

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan seharusnya merupakan perwujudan dari sebuah cita-cita yang diinginkan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan, untuk kaum perempuan ataupun kaum laki-laki. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan.

Pembangunan menurut Peet (2009), "*development means making a better life for everyone*" yang artinya bahwa pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, keamanan, tempat hidup yang sehat, layanan yang sama untuk setiap orang dan kepedulian diantara sesama untuk kehidupan yang lebih baik.

Menurut Mardikanto (2013:7) bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Adapun tujuan dari pembangunan tersebut menurut Mardikanto (2013:9) adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan baik materiil maupun non materiil.

Pembangunan yang berbasis pada masyarakat adalah hal yang seharusnya dilakukan. Menurut Mardikanto (2010:57) bahwa pembangun berbasis pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menekankan pada lokalitas baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam hal ini pembangunan akan menekankan pada *transformative and transactive planning, bottom up, community empowering* dan *participative*, yang kesemuanya ini disebut dengan pemberdayaan masyarakat (*community development*). Proses pembangunan berbasis pada pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*).

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat "*people centered development, participatory, empowering and sustainable*". *People centered development* merupakan pembangunan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia. (Adisasmita, 2006; Chambers, 1995; Korten, 1984)

Phillips, et al. (2009) "*community development is intended to build capacity*". Pada bagian lain disampaikan bahwa "*community developers build the capacity of a people when they encourage or teach others to create their own dreams, to learn new skills and knowledge*". Bahwa pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk membangun kapasitas masyarakat, dan mendorong atau mengajarkan orang lain untuk membuat impian mereka sendiri, untuk belajar keterampilan dan pengetahuan baru.

Parsons, et al. (1994) dalam Mardikanto (2010:35) pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bagaimana seseorang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuatan (kemampuan) yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan, sehingga memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto, 2010:36).

b. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat

Merujuk beragam pengertian mengenai pemberdayaan masyarakat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama.

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka filosofi pemberdayaan dapat digali dengan menggunakan konsep-konsep filosofi penyuluhan. Menurut Mardikanto (2013:115) di Amerika Serikat telah lama dikembangkan falsafah 3-T: *Teach, Truth and Trust* (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan / keyakinan) artinya filosofi pemberdayaan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain dalam pemberdayaan, masyarakat dididik untuk menerapkan setiap inovasi (informasi baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraan.

Selain itu rumusan filosofi pemberdayaan masyarakat lainnya adalah dikutip oleh Kesley dan Hearne (1955) dalam Mardikanto (2013:116) bahwa filosofi pemberdayaan harus berpijak kepada kepentingan pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya, karena itu bahwa falsafah pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselve*).

Mengacu pada pemahaman bahwa falsafah pemberdayaan masyarakat sebagai proses pendidikan, falsafah pendidikan di Indonesia adalah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu:

- 1) *ing ngarso sung tulodo*, mampu memberikan contoh atau tauladan bagi masyarakat sarasannya,
- 2) *ing madyo mangun karso*, mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba, dan
- 3) *tut wuri handayani*, mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakatnya sepanjang tidak menyimpang/meninggalkan acuan yang ada demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidupnya.

c. Prinsip-prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat prinsip yang merupakan dasar/pedoman dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Iffe (2002) dalam pemberdayaan masyarakat (*community development*) terdapat 26 prinsip dalam pengembangan/ pemberdayaan masyarakat yang dikelompokkan ke dalam prinsip ekologis, prinsip keadilan sosial, prinsip menghargai lokal, prinsip proses, serta prinsip global dan lokal. Iffe menekankan bahwa prinsip-prinsip *community development* tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan terkait. Prinsip-prinsip *community development* yang disampaikan oleh iffe (2002) adalah sebagai berikut :

1) Prinsip Ekologis (*Ecological principles*).

Dalam prinsip ini terdapat lima unsur yang menjadi basis *community development* yaitu; Holisme (*Holism*), Keberlanjutan (*Sustainability*), Diversitas atau Keberagaman (*Diversity*), Pembangunan Bersifat Organik (*Organic development*) dan Pembangunan yang Seimbang (*Balanced development*).

2) Prinsip Keadilan Sosial (*Social justice principles*).

Dalam *community development*, penting untuk selalu memadukan pendekatan ekologis dengan gagasan keadilan sosial. Terdiri dari: Memusatkan perhatian pada keadaan struktur yang merugikan (*Addressing structural disadvantage*), Memusatkan perhatian pada wacana yang merugikan (*Addressing discourses of disadvantage*), Pemberdayaan

(*Empowerment*), Mendefinisikan kebutuhan (*Need definition*) dan Hak Asasi Manusia (*Human rights*).

3) Prinsip Menghargai Lokal (*Valuing the local*).

Aksi dari berbasis kesadaran lokal, dewasa ini menjadi perhatian berbagai kalangan. Tema ini menjadi menguat ketika sentralisme terbukti gagal dalam pelaksanaan pembangunan. Prinsip lokal tersebut bisa dimaknai sebagai untuk menghargai: pengetahuan lokal (*valuing local knowledge*), kebudayaan lokal (*valuing local culture*), sumber daya lokal (*valuing local resources*), keahlian lokal (*valuing local skills*), dan proses lokal (*Valuing local processes*).

4) Prinsip Proses (*Process principles*).

Community development memandang lebih penting pada prosesnya daripada pada hasilnya, oleh karena itu, banyak penerapan prinsip-prinsip penting *community development* terfokus pada gagasan proses yang terdiri atas: proses, hasil, dan visi (*process, outcome and vision*), keterpaduan proses (*The integrity of process*), meningkatkan kesadaran (*Consciousness raising*), partisipasi (*Participation*), kerja sama dan konsensus (*Cooperation and consensus*), Gerak pembangunan (*The pace of development*), Damai dan tanpa kekerasan (*Peace and non-violence*), Inklusif (*Inclusiveness*), Membangun masyarakat (*Community building*).

5) Prinsip Global dan Lokal (*Global and local principles*).

Hubungan antara global dan lokal saat ini telah menjadi bagian yang nyata dari seluruh praktik *community development*, dan perlu dijadikan bagian untuk menyadarkan setiap *community worker*. Prinsip global dan lokal dalam hal ini adalah mengkaitkan global dan lokal (*linking the global and the local*) dan praktik anti penjajah (*anti-colonialist practice*).

Berikut ke-26 Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat dalam tabel dijelaskan secara mendetail sebagai berikut:

Tabel 2.1. Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat

PRINSIP-PRINSIP		KONSEKUENSI / DESKRIPSI	
EKOLOGIS	1	Holisme	Filosofi ekosentris, Menghormati kehidupan dan alam, Menolak solusi linear, Perubahan organik.
	2	Keberlanjutan	Konservasi, Mengurangi konsumsi, Ekonomi tanpa-pertumbuhan, Membatasi perkembangan teknologi, Anti-kapitalis.
	3	Keanekaragaman	Menghargai perbedaan, Tidak ada jawaban tunggal, Desentralisasi, Komunikasi jejaring dan lateral, Teknologi tingkat rendah.
	4	Perkembangan Organik	Menghormati & menghargai sifat-sifat khusus suatu masyarakat, dan memungkinkan serta mendorongnya untuk berkembang sesuai dengan caranya yang unik.
	5	Keseimbangan	Global/lokal, Yin/Yan, Gender, Hak/tanggungjawab, Perdamaian dan koperasi.
KEADILAN SOSIAL & HAM	6	Mengatasi Struktur yang Merugikan	Struktur-struktur & proses-proses pengembangan masyarakat dapat memperkokoh struktur-struktur penindasan yang dominan, misalnya dengan membabitkan ikut memenuhi prosedur-prosedur pihak penguasa. Pekerja masyarakat perlu membantu masyarakat untuk membicarakan permasalahan dan kegelisahan mereka, dan mulai menemukan segala sesuatu secara bersama, bukan secara perorangan agar mereka mampu melakukan sesuatu mengenai diri mereka.
	7	Mengatasi Wacana Wacana yang Merugikan	Perlu bagi pekerja untuk mampu mengidentifikasi dan membongkar wacana kekuasaan dan memahami bagaimana wacana itu memberikan hak istimewa secara efektif dan memberdayakan sebagian masyarakat, sementara memarjinalkan dan melemahkan sebagian masyarakat lainnya.
	8	Pemberdayaan	Pemberdayaan adalah suatu bentuk perubahan yang radikal, yang akan menjatuhkan struktur-struktur dan wacana dominasi yang ada. Membantu menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan secara sosial, dan pemberdayaan untuk anggota masyarakat lokal, terciptanya struktur berbasis masyarakat yang lebih efektif.

9	Hak Asasi Manusia	Hak Asasi Manusia penting bagi kerja masyarakat baik dalam pengertian negatif (<i>perlindungan</i> hak asasi manusia), maupun pengertian positif (promosi mengenai hak asasi manusia). Dalam pengertian negatif, sangat diperlukan bahwa proyek pengembangan masyarakat selaras dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, antara lain hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan berekspresi perlu dilindungi (dokumen PBB).
10	Definisi Kebutuhan	Fokus penting dari praktik sosial yang sangat mendasar (Fay, 1987) adalah mengajak masyarakat berdialog yang akan mengantarkan mereka menjadi lebih memahami kebutuhan mereka 'yang sesungguhnya' (Marcuse, 1964), dan bukan meminta definisi kebutuhan yang dibuat oleh orang/pihak lain.
11	Menghargai Pengetahuan Lokal	Bahwa pengetahuan dan keahlian lokal mungkin menjadi paling bernilai dalam memberikan informasi tentang pengembangan masyarakat, dan pengetahuan serta keahlian lokal ini perlu diidentifikasi dan diterima, bukan ditempatkan lebih rendah dari pengetahuan dan keahlian orang luar. Tentunya ada saat2 kapan pengetahuan dari luar diperlukan, tapi hal ini harus menjadi opsi terakhir, hanya setelah pengetahuan yang diperlukan dari masyarakat itu tidak tersedia.
12	Menghargai Budaya Lokal	Menghargai budaya lokal diperlukan untuk mengatasi persoalan globalisasi budaya yang merampas identitas budaya masyarakat, dan bahwa tradisi dan proses budaya lokal diakui dan didukung sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat, dengan catatan budaya lokal itu tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, keberlanjutan dan kebutuhan untuk mengatasi struktur dan wacana yang merugikan.
13	Menghargai Sumber Daya Lokal	Gagasan mengenai menetapkan kebutuhannya sendiri (<i>self-reliance</i>) pada prinsip no. 10, mengimplikasikan bahwa masyarakat seharusnya berupaya memanfaatkan sumber daya-nya sendiri (sumber daya finansial, teknik, alam dan manusianya), bukan mengandalkan dukungan dari luar.
14	Menghargai Keterampilan Masyarakat Lokal	Masyarakat lokal adalah orang-orang yang paling mengetahui masyarakat dan konteks lokalnya, dan keterampilan-ketrampilan yang telah dikembangkan secara lokal mungkin menjadi keterampilan-ketrampilan yang akan sangat dibutuhkan dalam lingkungan tersebut.
15	Menghargai Proses Lokal	Segala sesuatu tidak akan berhasil ketika dipaksakan dari luar, sehingga struktur dan proses berbasis masyarakat dipandang sebagai alternatif yang lebih tepat.

		<p>Pendekatan pengembangan masyarakat perlu benar-benar bertolak dari dalam masyarakat, dengan cara yang sesuai dengan konteks yang spesifik dan sangat peka terhadap budaya masyarakat lokal, tradisi dan lingkungan.</p>	
16	Partisipasi	<p>Pekerja masyarakat perlu memahami kompleksitas partisipasi, cara yang diperjuangkan dan tujuan yang berbeda yang hendak dicapai. Golongan, gender, dan ras/etnis perlu diperhatikan dalam partisipasi (untuk menjaga <i>inklusivitas</i>)</p> <p>Sebuah analisis partisipasi sebagai pemberdayaan sangatlah penting. Suatu apresiasi dari serangkaian pengetahuan dan keterampilan sangat diperlukan untuk memaksimalkan partisipasi dan penggunaan keterampilan ini menjadi sentral untuk proses <i>bottom-up</i>.</p>	
PROSES	17	Proses, Hasil dan Visi	<p>Membicarakan visi, bukan hasil, hal ini memang kurang spesifik dibandingkan gagasan mengenai hasil, tapi masih menekankan pentingnya menempatkan gagasan mengenai dimana kita mulai, dan untuk apa semua itu, serta penting bahwa ide ini dicakup dalam mempertimbangkan proses, karena ide tersebut memberikan visi yang menetapkan tujuan bagi proses.</p>
	18	Integritas Proses	<p>Proses dalam pengembangan masyarakat lebih penting daripada hasil, tetapi dalam pengertian yang sesungguhnya hasil tetap penting, bagaimanapun tujuan diharapkan untuk membangun proses masyarakat yang dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, proses harus sesuai dengan, dan juga mencerminkan harapan visi atau hasil, menyangkut isu-isu keberlanjutan, keadilan sosial dan hak asasi manusia.</p>
	19	Menumbuhkan Kesadaran	<p>Pekerja masyarakat perlu dapat melihat dan menggunakan peluang apapun untuk melakukan penumbuhan kesadaran secara informal, selama percakapan sehari-hari dengan orang-orang di masyarakat.</p> <p>Ada empat aspek penumbuhan kesadaran, yaitu : hubungan personal dan politik, mengembangkan hubungan dialogis, berbagi pengalaman tentang penindasan, dan membuka kemungkinan untuk bertindak.</p>
	20	Kerjasama dan Konsensus	<p>Perspektif ekologis dan pendekatan tanpa kekerasan, keduanya menekankan pentingnya struktur kooperatif, bukan struktur kompetitif. Oleh karena itu, perlu membangun struktur dan proses alternatif, yang didasarkan pada kerjasama, bukan konflik, dengan pembuatan keputusan secara mufakat atau konsensus.</p>

	21	Langkah Pembangunan	Konsekuensi alamiah dari perkembangan organis, yaitu bahwa masyarakat itu sendiri yang harus menentukan langkah untuk melakukan perkembangan. Usaha untuk mendorong proses pengembangan masyarakat yang terlalu cepat dapat menimbulkan proses yang dikompromikan, masyarakat jadi kehilangan rasa memiliki proses itu, dan hilang juga komitmen orang-orang yang terlibat.
	22	Perdamaian dan Anti Kekerasan	Dalam konteks ini, prinsip anti kekerasan menyatakan lebih dari sekadar membebaskan kekerasan fisik di antara orang-orang. Gagasan tentang kekerasan struktural berarti bahwa struktur dan institusi sosial dapat dipandang sebagai suatu bentuk kekerasan. Bahwa proses harus mencoba untuk menegaskan, bukan menyerang, untuk mencakup, bukan mengucilkan, bekerja berdampingan, bukan bersaing, dan menengahi, bukan menghadapi.
	23	Inklusivitas	Bahwa proses yang berjalan selalu mencoba untuk merangkul bukan mengucilkan, semua orang pada hakikatnya dihargai sekalipun mereka menyampaikan pandangan yang bersebrangan, dan orang-orang dimungkinkan memiliki peluang untuk mengubah posisi mereka dari suatu persoalan tanpa 'wajah kekalahan'.
	24	Membangun Masyarakat	Selalu berupaya menyadarkan orang-orangnya, memperkuat ikatan di antara anggota-anggotanya dan menekankan ide tentang saling-ketergantungan (<i>interdependen</i>), bukan ketergantungan (<i>dependen</i>), bukan juga kemandirian (<i>independen</i>). Jadi memperkuat hubungan di antara orang-orang melalui membangun masyarakat (<i>community building</i>).
GLOBAL & LOKAL	25	Menghubungkan yang Global dan Lokal	Dalam memahami suatu masyarakat, seorang pekerja masyarakat harus mampu memahami global maupun lokal, dan bagaimana keduanya saling mempengaruhi / berinteraksi
	26	Praktik Kolonialis Anti	Pekerja Masyarakat perlu melawan praktek kolonialis : 1. Melalui kesadaran diri yang kritis (<i>self-awareness</i>), kesadaran politik dan perenungan 2. Pekerja yang menempatkan dirinya dalam budaya yang dominan atau menguasai perlu menjabarkan implikasinya 3. Menyediakan ruang untuk memunculkan wacana dan tindakan alternatif, mengungkapkan perlawanan alamiah dari pihak yang terjajah 4. Dengan melangkah mundur, mendengar dan belajar, sebelum terburu-buru mengambil tindakan 5. Menjaga solidaritas dengan masyarakat dan berbagi

		agenda umum
		6. Bekerja dengan masyarakat
		7. Menerapkan uji timbal balik, dan bertanya bagaimana pekerja akan merasakan jika situasinya terbalik, dan dirinya yang dikenai 'pembangunan' yang diajukan untuk masyarakat

Dengan demikian prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat yang ideal harus dipenuhi agar masyarakat mampu berdaya dan berkemampuan sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan.

d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah memberdayakan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat secara sosio ekonomis. Dengan demikian, mereka dapat lebih mandiri, mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, dan sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Tujuan yang lebih spesifik lagi dari pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2013:125) adalah sebagai berikut.

a) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan / tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b) Perbaikan usaha (*better business*)

Dengan adanya perbaikan aksesibilitas dan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan

c) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan adanya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan

e) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat

f) Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai, menurut Jahi (2006) diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kemandirian masyarakat lokal, otonomi dalam pembuatan keputusan pada tingkat desa, dan partisipasi langsung yang demokratis dalam proses pemerintahan dan perwakilan. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat yang berdaya harus mempunyai kemandirian (bersifat mandiri), mampu membuat atau mengambil keputusan.
- 2) Adanya ruang bagi ekspresi budaya dan kesejahteraan spiritual dan *experiential social learning*. Masyarakat yang berdaya harus memiliki kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi budaya yang dimilikinya tanpa adanya rasa khawatir terhadap pihak lain. Mereka mau dan mampu belajar dari pengalaman hidup bermasyarakat untuk memperbaiki sistem sosialnya.
- 3) Akses pada lahan dan sumber daya lain, pendidikan untuk perubahan dan perumahan dan fasilitas kesehatan. Masyarakat yang berdaya memiliki akses pada lahan dan sumberdaya lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akses pada pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas berpikir, memiliki rumah yang layak untuk tinggal bersama keluarganya serta memiliki akses pada pelayanan kesehatan yang memadai.
- 4) Akses pada pengetahuan dan ketrampilan (internal maupun eksternal) untuk menjaga stok modal alami dan lingkungan secara berkesinambungan. Pengetahuan dan ketrampilan merupakan modal utama bagi seseorang atau sekelompok orang agar dapat berdaya dan mandiri.
- 5) Akses pada pelatihan dan ketrampilan, teknik-teknik pemecahan masalah, teknologi tepat guna dan informasi. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut

dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehingga tidak tergantung pada pihak lain.

- 6) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan oleh semua orang terutama wanita dan pemuda. Keputusan yang diambil berdasarkan pada kesepakatan dan melibatkan semua elemen masyarakat akan menjamin terlaksananya program pemberdayaan yang direncanakan.

Dengan demikian melalui program pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang dulunya belum berdaya secara ekonomi, sosial dan ekologi menjadi masyarakat yang lebih berdaya, berkekuatan dan berkemampuan sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan.

e. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Terkait dengan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. Parson et. al (1994) dalam Mardikanto (2013:185) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilaksanakan secara kolektif.

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individual melalui bimbingan, konseling, *stress management* dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien (penerima manfaat) dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

- 2) Pendekatan Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien (penerima manfaat) agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3) Pendekatan Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar karena penerima manfaat perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien (penerima manfaat) sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta merumuskan strategi yang tepat untuk bertindak.

Menurut Nagel dalam Mardikanto (2013:183) bahwa apapun pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan harus memperhatikan:

- 1) tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan,
- 2) sistem transfer teknologi yang dilakukan,
- 3) pengembangan sumber daya manusia / fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan, dan
- 4) alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan.

f. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas yang harus dicapai. Oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mengacu pada Korten, Sumodiningrat dalam Mardikanto (2013:194-195) strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan pemberdayaan masyarakat terdapat lima strategi pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Strategi *Relief and Welfare*

Strategi yang lebih mengutamakan pemenuhan pada kekurangan dan kebutuhan individu dan masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

2. Strategi *Community Development*

Strategi yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat guna dan pembangunan infrastruktur. Pada strategi ini tidak mungkin

dilakukan dengan pendekatan pembangunan dari atas (*top-down approach*) melainkan harus dilakukan pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom-up approach*).

3. Strategi *Sustainable System Development*

Strategi yang mengharapkan terjadinya perubahan di tingkat regional dan nasional. Melalui strategi ini diharapkan terjadi perubahan kebijakan yang keluar dari tingkat daerah (lokal) ke tingkat regional, nasional, internasional utamanya terkait dengan dampak pembangunan yang terlalu eksploitatif dan mengabaikan pelestarian / keberlanjutan pembangunan.

4. Strategi Gerakan Masyarakat (*People Movement*)

Strategi ini dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal serta mobilisasi sumber daya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan.

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat (*Empowering People*)

Strategi ini memperhatikan arti penting perkembangan teknologi, persaingan dan kerjasama. Pada strategi ini lebih terbuka terhadap kemampuan dan keberanian masyarakat dan pengakuan terhadap inisiatif lokal.

g. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2013:227-235) dalam praktek pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa metode pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut.

(1) Metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*

Metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)* merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat dalam prakteknya, metode ini banyak dilakukan oleh orang luar tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat.

(2) Metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

Metode yang merupakan penyempurnaan dari metode RRA. PRA merupakan metode penilaian keadaan desa secara partisipatif yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan. Berbeda dengan RRA yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari orang luar, PRA dilakukan dengan lebih banyak

melibatkan orang dalam yang terdiri dari semua stakeholders dengan difasilitasi oleh orang luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator.

(3) Metode *Focus Group Discussion (FGD)*

Metode pengumpulan data yang merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) diarahkan oleh seorang pemandu (moderator) untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang dilakukan atau dicermatinya. Pelaksanaan FGD sebagai diskusi terarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan suatu program melalui diskusi yang partisipatif dengan dipandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan seringkali juga mengundang narasumber.

(4) Metode *Participatory Learning and Action (PLA)*

Metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar melalui ceramah, curah-pendapat, diskusi tentang suatu topik misalnya pengolahan lahan, pesemaian dll yang segera setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.

(5) Metode Sekolah Lapang (*Farmers Field School*)

Metode sekolah lapang merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu yang diawali dengan membahas masalah yang dihadapi, curah pendapat, berbagi pengalaman tentang alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai sumberdaya yang dimiliki.

(6) Pelatihan Partisipatif

Sebagai proses pendidikan, kegiatan pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan menggunakan melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan. Sesuai dengan prinsipnya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mengacu pada kebutuhan penerima manfaatnya. Substansi materi pelatihan partisipatif selalu mengacu kepada kebutuhan peserta pelatihan. Oleh karena itu sebelum pelatihan dilaksanakan selalu diawali dengan kontrak belajar, yaitu kesepakatan tentang substansi materi, urutan, tata waktu dan tempat.

h. Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses pengembangan masyarakat memiliki lingkup pemberdayaan masyarakat, menurut Mardikanto (2013: 129-138) terdiri dari sebagai berikut:

1. Bina Manusia

Sebagai upaya yang pertama dan utama dalam pemberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Dalam hal ini bina manusia mencakup upaya penguatan atau pengembangan kapasitas manusia. Adapun pengembangan kapasitas manusia terdiri atas:

- a. pengembangan kapasitas individu meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan,
- b. pengembangan kapasitas entitas atau kelembagaan yang meliputi:
 - 1) kejelasan visi, misi dan budaya organisasi,
 - 2) kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi,
 - 3) proses organisasi atau pengelolaan organisasi,
 - 4) pengembangan jumlah dan mutu sumber daya,
 - 5) interaksi antar individu di dalam organisasi, dan
 - 6) interaksi entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain.
- c. Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi:
 - 1) pengembangan interaksi antarentitas (organisasi) dalam sistem yang sama, dan
 - 2) pengembangan interaksi dengan entitas (organisasi) di luar sistem.

2. Bina Usaha

Merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan dan sebagai dampak dari bina manusia yang mampu memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan sehingga memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Bina Usaha meliputi:

- a. pemilihan komoditas dan jenis usaha,
 - b. studi kelayakan dan perencanaan bisnis,
 - c. pembentukan badan usaha,
 - d. perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan,
 - e. pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan karier,
 - f. manajemen produksi dan operasi,
 - g. manajemen logistik dan finansial,
 - h. penelitian dan pengembangan,
 - i. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis,
 - j. pengembangan jaringan dan kemitraan, dan
 - k. pengembangan sarana dan prasarana pendukung.
3. Bina Lingkungan
- Bina lingkungan terdiri atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dalam hal ini lingkungan sosial juga berperan penting dalam menentukan keberlangsungan bisnis dan kehidupan.
4. Bina Kelembagaan.
- Kelembagaan menurut Hayami dan Kikuchi dalam Mardikanto (2013) merupakan suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan jika memiliki empat komponen sebagai berikut.
- a) Person yaitu orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas
 - b) Kepentingan : dimana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh adanya tujuan / kepentingan sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi
 - c) Aturan: adanya seperangkat kesepakatan yang dipegang bersama sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
 - d) Struktur: Setiap orang yang terlibat dalam kelembagaan memiliki posisi dan peran yang harus dijalankan secara benar. Orang tidak bisa merubah posisinya dengan kemauan sendiri.

i. Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013:149) mengandung makna sebagai berikut.

- 1) Berbeda dengan kedudukan sebagai sasaran masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain
- 2) Penerima manfaat bukan objek atau sasaran tembak yang layak dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para fasilitator melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan
- 3) Berbeda dengan kedudukan sebagai sasaran yang tidak punya pilihan atau kesempatan untuk menawar setiap materi yang disampaikan, selain harus menerima /mengikuti, penerima manfaat memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan fasilitatornya.

Adapun ragam penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013: 150) adalah sebagai berikut.

1. Pelaku utama yang terdiri dari warga masyarakat dan keluarganya yang selain sebagai penerima manfaat juga pengelola kegiatan yang berperan dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang dimilikinya.
2. Penentu kebijakan yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana dan pengendali kebijakan pembangunan. Termasuk dalam kelompok ini adalah elit masyarakat sejak dilevel desa yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan.
3. Pemangku kepentingan yang lain yang mendukung / memperlancar kegiatan pembangunan. Termasuk dalam kelompok ini adalah : a). Peneliti dan atau akademisis yang berperan dalam penemuan, pengujian dan pengembangan inovasi yang diperlukan oleh pelaku utama. b). Produsen sarana produksi dan peralatan / mesin-mesin yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi yang

dihasilkan para peneliti. c).Pelaku bisnis (distributor/penyalur/pegecer) sarana produksi dan perlatan yang dibutuhkan. d). Media massa dan pusat-pusat informasi (e). Aktivist LSM, tokoh masyarakat dll yang berperan sebagai organisator, fasilitator dan penasehat pelaku utama. (f). Budayawan, Artis dll yang berperan dalam diseminasi inovasi.

Selain keragamannya masing-masing kelompok penerima manfaat juga perlu mendapat perhatian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting kaitannya dengan pemilihan dan penetapan materi, metode, waktu dan tempat dan perlengkapan penyuluhan yang dibutuhkan. Beberapa karakteristik penerima manfaat yang perlu dicermati adalah sebagai berikut.

- 1) Karakteristik pribadi yang mencakup: jenis kelamin, umur, suku, etnis agama dan lain-lain.
- 2) Status sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pendapatan dan keterlibatannya dalam kelompok / organisasi kemasyarakatan.
- 3) Perilaku keinovatifan sebagaimana yang dikelompokkan oleh Rogers (1971) yang terdiri dari perintis (*inovator*), pelopor (*early adopter*), penganut dini (*early majority*), penganut lambat (*early majority*), dan kelompok yang tidak bersedia berubah (*laggards*)
- 4) Moral ekonomi masyarakat yang dibedakan dalam moral subsistensi dan moral rasionalitas.

j. Sistem Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chuschman dan Awad dalam Mardikanto (2009), mengartikan sistem sebagai sekumpulan unsur yang mempunyai fungsi dan bergerak dalam ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama sekaligus tujuan masing-masing. Berdasarkan pengertian sistem penyuluhan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdiri dari kebijakan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, pengawasan, dan pengendalian penyuluhan.

Dalam penelitian ini sistem pemberdayaan yang dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, pengawasan, dan pengendalian yang selama ini telah dilakukan kepada penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat.

k. Model Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Jack Rothman (1995: 27-34), dalam sebuah tulisannya yang berjudul "*Approaches to community intervention*" mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsep tentang pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Setiap komponennya bisa digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.

1) Model Pengembangan Masyarakat Lokal (PML)

Model PML memberikan perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan perubahan. PML adalah proses yang dirancang untuk mendapatkan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat. Tema-tema pokok dalam model PML mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerjasama atas dasar kesukarelaan, keswadayaan, pengembangan, kepemimpinan setempat, dan tujuan yang bersifat pendidikan. PML pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

2) Model Perencanaan Sosial (PS)

Model ini menekankan pada proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif seperti kemiskinan, pengangguran,

kenakalan remaja dll. Model PS ini mengungkapkan pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

3) Model Aksi Sosial (AS)

Model ini menekankan pentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung juga meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratisasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka menanggulangi masalah.

Berikut perbandingan dari ketiga model pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dapat dijelaskan pada tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2. Model Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

	Model Pengembangan Masyarakat Lokal (PML)	Model Perencanaan Sosial (PS)	Model Aksi Sosial (AS)
1. Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat	Kemandirian: Pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat (tujuan yang dititikberatkan pada proses = <i>process goals</i>)	Pemecahan masalah dengan memperhatikan masalah yang penting yang ada pada masyarakat (tujuan dititikberatkan pada tugas = <i>task goals</i>)	Pergeseran (pengalihan) sumber daya dan relasi kekuasaan: perubahan institusi dasar (<i>task goals</i>) ataupun (<i>process goals</i>)
2. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya	Adanya anomie dan "kemurungan" dalam masyarakat, kesenjangan relasi dan kapasitas dalam memecahkan masalah secara demokratis, komunitas berbentuk tradisional statis	Masalah sosial yang sesungguhnya: kesehatan fisik dan mental, perumahan dan rekreasi	Populasi yang dirugikan: kesenjangan sosial, perampasan hak dan ketidakadilan

3. Strategi perubahan dasar	Pelibatan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri	Pengumpulan data yang terkait dengan masalah dan memilih serta menentukan bentuk tindakan yang paling rasional	Kristialisasi dari isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pengorganisasian massa untuk menghadapi sasaran yang menjadi "musuh" mereka
4. Karakteristik taktik dan teknik perubahan	Konsensus: Komunikasi antar kelompok dan melalui kelompok kepentingan dalam masyarakat: diskusi kelompok	Teknik pengumpulan data dan ketrampilan untuk menganalisis konsensus atau konflik tergantung hasil analisis perencanaan	Konflik : konfrontasi aksi yang bersifat langsung (memobilisasi massa, demonstrasi, pemboikotan)
5. Peran praktisi yang menonjol	Sebagai enabler-katalis, koordinator: orang yang mengajarkan ketrampilan memecahkan masalah dan nilai-nilai etis	Expert (pakar): peran lebih menekankan pada penemuan fakta, implementasi program, reasi dengan berbagai macam birokrasi dan expert lain	Aktifis, advokat, negosiator, partisan yang menciptakan pergerakan masa
6. Media perubahan	Manipulasi kelompok kecil yang berorientasi pada terselesaikannya suatu tugas	Manipulasi organisasi formal dan data yang tersedia	Manipulasi organisasi masa dan proses-proses politik
7. Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Struktur kekuasaan sudah tercakup dalam komunitas. Anggota dari struktur kekuasaan bertindak sebagai kolaborator	Struktur kekuasaan sebagai pemilik dan pendukung	Struktur kekuasaan sebagai sasaran eksternal dari tindakan yang dilakukan
8. Batasan definisi sistem klien dalam komunitas	Keseluruhan komunitas geografis	Keseluruhan komunitas atau dapat suatu segmen dalam komunitas	Segmen dalam komunitas yang memberikan bantuan, membutuhkan layanan tapi tidak terjangkau oleh layanan tersebut
9. Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok di dalam suatu komunitas	Berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat menghasilkan pemufakatan	Pemufakatan atau konflik bisa ditolerir selama tidak menghalangi proses pencapaian tujuan	Kepentingan dari masing-masing bagian dalam masyarakat sangat bervariasi / konflik kepentingan yang

			sulit dicapai kata mufakat
10. Konsepsi mengenai populasi klien	Warga masyarakat sebagai sumber daya / asset yang berharga	Konsumen (pengguna jasa, memanfaatkan program dan layanan)	“Korban”
11. Konsepsi mengenai peran klien	Sebagai partisipan aktif pada proses interaksional pemecahan masalah	Konsumen atau resipien (penerima pelayanan)	Employee, konstituen, anggota, partisipan
12. Pemanfaatan pemberdayaan	Mengembangkan kapasitas komunitas untuk mengambil keputusan bersama, serta membangkitkan rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyarakat	Mencari tahu dari pengguna jasa tentang layanan apa yang mereka butuhkan serta memberi tahu para pengguna jasa tentang pilihan jasa yang ada	Meraih kekuasaan objektif bagi mereka yang “tertindas” agar dapat memilih dan memutuskan cara yang tepat guna melakukan aksi serta membangkitkan rasa percaya diri partisipan akan kemampuan mereka

2. Perspektif Gender Dalam Pembangunan

Secara *de jure* pengakuan akan pentingnya perempuan dalam pembangunan tersurat dalam hasil konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yaitu *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979. Konvensi CEDAW ini terdiri dari 30 pasal, pada dasarnya konvensi ini tidak jauh berbeda dengan *Declaration of Human Rights* PBB. Pada konvensi CEDAW ini terdapat beberapa penekanan yang menyangkut hak – hak perempuan, seperti pada pasal 11 tentang hak kerja, pasal 12 dalam bidang kesehatan, pasal 14 tentang perempuan pedesaan, Pasal 15 persamaan hak antara laki – laki dan perempuan di hadapan hukum. Pasal 16 menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan.

Di Indonesia, pengakuan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan juga tersurat dalam INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Melalui INPRES tersebut presiden menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara,

termasuk gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh Indonesia. Melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) maka seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan perspektif gender yakni melibatkan peran serta warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Namun pada kenyataannya, perempuan cenderung dijadikan objek dalam pembangunan. Seolah perempuan belum dapat berperan secara optimal sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap hanya memiliki peran domestik (privat) saja sehingga kurang diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan dalam pembangunan. Di samping adanya budaya patriaki yang menempatkan peran laki-laki sebagai makhluk yang berkuasa, berangkat dari pelabelan yang terkonstruksi kuat terhadap masyarakat bahwa kewajiban perempuan adalah berada dalam ranah domestik rumah tangga. Kondisi inilah yang secara langsung mempengaruhi kesenjangan perempuan dalam perannya pada pembangunan.

Berbicara gender dalam pembangunan tidak terlepas dari bagaimana strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan seluruh masyarakat baik laki-laki dan perempuan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup agar hidup sejahtera.

Ada beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh pemerintah dunia tentang bagaimana peran gender dalam pembangunan dunia. Pertama adalah Pendekatan WID (*Women In Development*), bagaimana sebuah pembangunan yang merupakan proses kemajuan harus berjalan secara linear dan pasti. Seperti yang sudah dibahas bahwasanya sejauh ini peran perempuan dalam hal domestik selalu hanya melekat kepada tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh seorang perempuan, peran-peran tersebut dalam hubungannya dengan kerumahtanggaan, keluarga dan tugas-tugas rutin di rumah sehari-hari. Sebaliknya peran publik berkaitan dengan dunia luar rumah, baik dalam pekerjaan formal, kemasyarakatan dan sosial ekonomi

banyak diidentikkan dengan dunia kaum laki-laki. Hal ini yang kemudian menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Pendekatan WID (*Women In Development*), sendiri mefokuskan pada 2 sasaran mengenai pentingnya Prinsip Egalitarian dimana pembangunan kerangka pikir bahwa semua orang sederajat dan terciptanya penghapusan diskriminasi. Dengan demikian pendekatan WID (*Women In Development*) ini dapat meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, keterampilan serta kebijakan yang mampu untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

Kedua, pendekatan WAD (*Women And Development*) dimana setelah keberlanjutan dari pendekatan WID (*Women In Development*), tahap selanjutnya ada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. Dalam pendekatan ini tidak dibahas mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan, karena sudah ada pemahaman bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan, kesempatan dan peran yang sejajar.

Berdasarkan pendekatan ini dapat menaikkan peran perempuan apabila ditunjang oleh struktur politik yang lebih stabil dan merata, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pendekatan ini lebih ditekankan pada peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan.

Praktik dari kegiatan ini mestinya berada diluar aktivitas domestik sebagai tanggung jawab perempuan juga. Ukuran dari pelaksanaan WAD (*Women And Development*) harus bersifat ukuran produktivitas perempuan secara kesempatan dan kemampuan bukan hanya sebatas kesetaraan keseluruhan aktivitas.

Ketiga, Pendekatan GAD (*Gender And Development*) yang menekankan pada orientasi hubungan sosial. Seperti diketahui bahwasanya gender dapat dimaknai sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara jenis kelamin. Gender lebih mengarah pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan hubungan ini dikonstruksikan baik secara sosial maupun budaya. Dalam hal ini GAD

(*Gender And Development*) harus mewujudkan bagaimana hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan.

Ketiga pendekatan tersebut merupakan sebuah terobosan dari pemerintah dunia yang tentunya harus dilaksanakan dengan baik, agar pembangunan berspektif gender bisa terwujud, tanpa harus menimbulkan sebuah diskriminasi diantara kedua kaum baik laki-laki maupun perempuan karena pada hakekatnya setiap masyarakat (baik laki-laki dan perempuan) memiliki kesempatan yang sama dan berperan dalam pembangunan.

a. Pengertian Gender

Secara umum kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Definisi lain menurut Smith et al. (2009) "*Gender should be conceptualized as a set of relations, existing in social institutions and reproduced in interpersonal interaction*". Gender diartikan sebagai suatu set hubungan yang nyata di intitusi sosial dan dihasilkan kembali dari interaksi antar personal. "*Gender is not a property of individuals but an ongoing interaction between actors and structures with tremendous variation across men's and women's lives individually over the life course and structurally in the historical context of race and class*". (Ferree 1990 dalam Smith et al. 2009). Gender bukan merupakan property individual namun merupakan interaksi berkesinambungan antar aktor dan individual dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan secara individual sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas.

Selanjutnya menurut Hubeis (2010) gender adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis akan tetapi oleh lingkungan sosial-budaya, politik dan ekonomi sehingga tidak bersifat kodrati. Perempuan dan laki-laki memang berbeda namun tidak

untuk dibeda-bedakan, terutama dalam hal memiliki kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar berperan dalam kegiatan politik, ekonomi sosial dan budaya.

Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui dan laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Perbedaan jenis kelamin ini merupakan ciptaan Tuhan (*given*) bersifat kodrati, tidak dapat dirubah dan berlaku sepanjang jaman.

b. Teori Gender

Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender. Hillary M. Lips (2006:234) dalam bukunya *Sex And Gender : An Introduction* dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu *teori nurture* dan *teori nature*. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan *teori equilibrium*.

1. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

2. Teori *Nature*

Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nature yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender maka beralih ke teori nature. Agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.

3. Teori *Equilibrium*

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan

kebersamaan guna membangun kemitraan yang hamonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

Ketiga teori gender tersebut banyak diilhami dari berbagai teori gender barat yang berakar dari pengalaman perempuan di negara barat. Untuk perempuan di negara dunia ketiga khususnya negara Indonesia, peneliti menggunakan Teori Gender Pasca Kolonial, dimana teori ini menolak bahwa pengalaman perempuan di negara barat berbeda dengan pengalaman perempuan di negara dunia ketiga. Pengalaman perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama sehingga memiliki perbedaan dengan perempuan yang hidup di negara barat.

4. Teori Gender Pasca Kolonial

Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang di dunia pertama / negara barat. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme pasca kolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat.

Beverly Lindsay dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pada tulisan Laela Gandhi yang berjudul *Imperialist Feminist: Women (in) Difference* dalam *Post Colonial Theory:*

Acritical Introduction (1998) memberikan rangkuman tentang kritik Teori Pasca Kolonial terhadap feminisme. Menurutnya, Teori Feminis dan Pasca Kolonial sama-sama dimulai dengan tujuan meruntuhkan hirarki-hirarki gender/kultural/ras, dan masing-masing dari keduanya menerima anjuran pos-strukturalis untuk menolak oposisi biner pada otoritas patriarki/kolonial yang mengkonstruksi dirinya. Akan tetapi, terdapat tiga wilayah kontroversi utama yang meretakkan potensi menyatunya pasca kolonialisme dengan feminisme, yaitu debat yang melingkupi sosok ‘perempuan di dunia-ketiga’, problematika sejarah mengenai ‘feminis sebagai imperialis’ dan penempatan istilah kolonialis pada ‘kriteria feminis’ sebagai penyokong ‘misi pemberadaban’ (Gandhi, 1998).

Menurut Gandhi, perselisihan yang paling signifikan antara Teori Pasca Kolonial dan feminis terjadi pada perselisihan soal figur ‘perempuan di dunia-ketiga’. Beberapa feminis Pasca Kolonial telah dengan jelas menyatakan argumen bahwa batasan perhatian terhadap politik rasial tak dapat menghindari adanya ‘kolonialisasi ganda’ terhadap perempuan dalam imperialisme. Perempuan dunia ketiga adalah korban tiada duanya yang terlupakan dari imperialis medan patriarki baik natif maupun asing. Hal tersebut disebabkan oleh kebutaan gender dalam nasionalisme anti-kolonial yang tidak dapat diingkari.

Sementara itu, Talpade Mohanty dalam artikelnya yang berjudul *Under Western Eyes: feminist scholarship and colonial discourse* melihat permainan diskursif kolonialisme dalam produksi ‘perempuan dunia ketiga’ sebagai subjek monolitik tunggal dalam teks-teks feminis barat. Di dalam artikelnya, “*Under Western Eyes*,” Mohanty menaruh perhatian pada pembahasan para feminis barat mengenai para perempuan di dunia ketiga. Mohanty melihat bahwa di mata para perempuan barat, para perempuan dunia ketiga adalah sekelompok orang yang “tidak berdaya” yang bersifat homogen. Mereka

dipandang sebagai korban-korban implisit dari budaya dan struktur sosial ekonomi tertentu. Di dalam kritiknya terhadap konstruksi teoritis seperti ini, Mohanty berpendapat bahwa tindakan penghomogenisasian para perempuan ini mengukuhkan analisa kategori-kategori feminis yang bersifat eurosentris dan mengingkari berbagai pengalaman dari kelompok-kelompok non barat dalam hal ini negara dunia ketiga.

Menurut Mohanty (1994) bahwa kategori analitis 'perempuan dunia ketiga' bersifat kolonialis atas dasar dua alasan. Pertama, *myopia etnosentris* yang tidak melihat besarnya perbedaan material dan historis antara perempuan dunia ketiga dalam 'kenyataan'. Kedua, 'Peliyangan' terhadap perempuan dunia ketiga 'juga telah menjadi suatu proyek konsolidasi diri bagi feminis barat. Selain itu, Mohanty juga menunjukkan bahwa karya feminisme barat dalam ilmu sosial menekankan bahwa perempuan di dunia ketiga memiliki ketidak-dewasaan politik, dinyatakan sebagai terabaikan, miskin, tidak berpendidikan, terikat tradisi, domestik, *family-oriented*, dan selalu menjadi korban. Menurutnya bahwa perempuan dunia ketiga dalam hal ini justru memfasilitasi perempuan barat sebagai yang terdidik, modern, memiliki kontrol terhadap tubuh mereka sendiri dan seksualitasnya, dan memiliki kemerdekaan untuk membuat keputusannya sendiri.

Mohanty dalam artikelnya yang lain "*Under Western Eyes*" *Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles* (2003) juga menemukan bahwa kerangka politik dan ekonomi global didominasi oleh perempuan dunia pertama. Sedangkan perempuan di dunia ke tiga seringkali menjadi sasaran pada perkembangan ekonomi global untuk kepentingan kapitalis. Dalam hal ini kapitalisme seringkali memanfaatkan pengalaman dan perjuangan perempuan dunia ketiga untuk mencari keuntungan secara global. Mohanty juga menyampaikan untuk menganalisis kehidupan para perempuan dunia

selain konteks sistemik lokal budaya, juga penting untuk memperhatikan konteks mikro ekonomi, mikro politik dan konteks politik dan ekonomi global yang mempengaruhi kehidupan perempuan dunia ketiga.

Dalam analisisnya, Mohanty juga menyampaikan bahwa perempuan dunia ketiga dapat melawan kapitalisme melalui kekuatan anti kapitalis yaitu dengan pengalaman dan perjuangannya.

Dalam hal ini Teori Gender Pasca Kolonial, khususnya Mohanty menolak atau membebaskan diri dari pemikiran Teori Gender Barat. Teori Gender Pasca Kolonial (Mohanty) lebih menekankan bahwa perempuan yang hidup di negara dunia ketiga memiliki perbedaan dengan perempuan yang hidup di negara barat. Perempuan yang hidup di negara dunia ketiga dalam hal ini Indonesia memiliki perbedaan dalam hal aspek material dan aspek historis (sejarah) yang berupa pengalaman, tradisi / budaya, karakteristik yang berbeda, sehingga ketika akan menganalisis kehidupan dan peran perempuan di Indonesia tidak dapat disamakan dengan konteks kehidupan perempuan barat atau menggunakan Teori Gender Barat. Dengan demikian, dalam penelitian ini teori gender yang digunakan adalah Teori Gender Pasca Kolonial.

c. Peran dan Kebutuhan Gender

Jika berbicara dalam konteks gender perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kebutuhan dalam masyarakat. Peran dan kebutuhan yang terdapat pada perempuan dan laki-laki bisa berbeda-beda dari suatu masyarakat, budaya, dan periode historis.

Peran gender (*gender roles*) merupakan aktivitas yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki atas dasar pembedaan yang diterimanya. Selama ini, dalam masyarakat, peran, tugas dan pembagian kerja laki-laki dan perempuan diterapkan secara ketat atas dasar karakteristik

gender dan atribut-atributnya, dan bukan atas dasar kemampuan dan keterampilan.

Peran perempuan dalam konteks gender menurut Moser Framework dalam Overholt & Austin (1991) bahwa kebanyakan masyarakat perempuan yang berpendapatan rendah memiliki tiga (3) peran yaitu : perempuan mengurus kegiatan reproduktif, produktif dan pengaturan masyarakat.

(1) Peran Reproduksi

Melibatkan kepedulian dan pelestarian rumah tangga dan keluarganya termasuk melahirkan dan merawat anak-anak, mempersiapkan makanan, mengambil air dan bahan bakar, berbelanja, merawat rumah dan kesehatan keluarga. Kerja reproduktif sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia dan pelestarian reproduksi angkatan kerja, tetapi hal itu jarang dianggap sebagai “pekerjaan yang benar-benar pekerjaan” karena tidak memperoleh gaji secara nyata seperti halnya pekerjaan-pekerjaan yang lain.

(2) Peran Produksi

Melibatkan produksi barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperdagangkan/dijual (pertanian, perikanan, ketenaakerjaan dan mempekerjakan diri sendiri). Ketika orang ditanya apa pekerjaan mereka, jawaban yang diberikan paling sering mengacu pada pekerjaan produktif terutama pekerjaan yang mendapatkan bayaran dan menghasilkan pendapatan. Laki-laki dan perempuan dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif tetapi seringkali fungsi dan tanggungjawab mereka berbeda. Pekerjaan produktif perempuan seringkali lebih tidak dihargai dibandingkan pekerjaan produktif laki-laki.

(3) Peran Kemasyarakatan/sosial

Melibatkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas sosial secara bersama: upacara-upacara dan peringatan-peringatan, kegiatan-kegiatan peningkatan masyarakat, partisipasi dalam kelompok

dan organisasi, kegiatan-kegiatan politik lokal dan sebagainya. Jenis pekerjaan ini jarang dipertimbangkan atau dilihat dalam analisis ekonomi suatu masyarakat. Tetapi jenis pekerjaan ini melibatkan jumlah waktu yang cukup besar yang diberikan secara suka rela dan penting bagi perkembangan spiritual dan budaya masyarakat dan merupakan suatu kendaraan untuk pengaturan dan penentuan nasib masyarakat. Baik laki-laki dan perempuan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan meskipun suatu pembagian kerja berdasar gender juga berlaku disana. Sedangkan peran yang diemban laki-laki adalah terutama mengurus kegiatan-kegiatan produktif dan sosial politik dalam masyarakat.

Adapun kebutuhan perempuan dalam konteks gender memiliki kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran-peran sosial yang diperankan oleh mereka untuk merespons kebutuhan jangka pendek, seperti perbaikan taraf kehidupan. Sedangkan kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan subordinasi perempuan terhadap laki-laki seperti pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya, termasuk di dalamnya adalah penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan (Juklak Inpres No. 9 Tahun 2000).

Dalam masyarakat, ketika perempuan terpenuhi kebutuhan strategisnya, perempuan memiliki peran strategis, sebaliknya jika perempuan hanya terpenuhi kebutuhan praktisnya, perempuan tidak berperan secara strategis hanya berperan praktis saja.

d. Sinergisitas Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Konteks Gender

Sinergisitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008) sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan biasanya pengaruhnya lebih besar daripada jumlah total pengaruh masing-masing atau satu-persatu. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto

(2002) yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan gender adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis akan tetapi oleh lingkungan sosial-budaya, politik dan ekonomi sehingga tidak bersifat kodrati. (Hubeis, 2010).

Dengan demikian yang dimaksud dengan sinergisitas peran gender adalah keterpaduan berbagai unsur peran yang dimiliki perempuan dan laki-laki yang dapat menghasilkan keluaran atau pengaruh yang lebih baik dan lebih besar. Sinergisitas peran gender akan mudah terjadi bila antara perempuan dan laki-laki mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. Adanya sinergisitas peran gender berarti adanya berbagi peran yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling menguatkan, saling menguntungkan demi mencapai tujuan tanpa harus mengunggulkan satu dengan yang lainnya.

Bentuk sinergisitas peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga dapat dilakukan melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan dalam rumahtangga.

Adanya sinergisitas peran gender dalam keluarga dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dan laki-laki untuk berperan aktif dalam proses pembangunan di masyarakat. Dalam hal ini adalah program pemberdayaan masyarakat CSR Bank Sampah Mandiri. Dengan demikian sinergisitas peran perempuan dan laki-laki dapat menciptakan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal akses, kontrol dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga kebutuhan gender praktis maupun strategis bagi perempuan dan laki-laki dapat terpenuhi.

e. Analisis Gender Kerangka Moser

Menurut Mansour (2007) analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang

terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu.
- 2) Aspek peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
- 3) Aspek kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
- 4) Aspek manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.

Dengan demikian, analisis gender adalah proses menganalisa data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Analisis gender merupakan alat dan teknik yang tepat untuk mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat teridentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahannya.

Dalam penelitian ini analisis gender yang digunakan adalah analisis gender kerangka Moser. Kerangka Moser dikembangkan oleh Caroline Moser. Kerangka Moser berusaha memasukkan agenda pemberdayaan dimana sasarannya adalah pembebasan perempuan dari subordinasi dan mencapai persamaan, keadilan dan pemberdayaan bagi perempuan. Menurut Moser Framework dalam Overholt & Austin (1991) analisis gender kerangka Moser didasarkan pada pendekatan pembangunan dan gender (*Gender and Development/GAD*) yang dibangun pada pendekatan perempuan dalam pembangunan (*Women In Development/WID*) yang lebih awal dan pada Teori Feminisme.

Adapun tujuan dari kerangka pemikiran perencanaan gender dari Moser adalah sebagai berikut.

- 1) Mengarahkan perhatian pada cara pembagian pekerjaan berdasarkan gender mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam intervensi-intervensi yang telah direncanakan.
- 2) Membantu perencanaan untuk memahami bahwa kebutuhan-kebutuhan perempuan adalah seringkali berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan laki-laki.
- 3) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis dan kebutuhan-kebutuhan strategis gender.

Pada analisis gender kerangka Moser terdapat tiga konsep utama yaitu sebagai berikut.

- a) Tri peranan peran (*triple roles*) yaitu peran produktif, reproduktif dan sosial.
- b) Berupaya untuk membedakan antara kebutuhan yang bersifat praktis dan strategis bagi perempuan dan laki-laki. Kebutuhan strategis berelasi dengan kebutuhan transformasi status dan posisi perempuan (seperti subordinasi).
- c) Pendekatan analisis kebijakan fokus pada kesejahteraan (*welfare*), kesamaan (*equity*), anti kemiskinan, efisiensi dan pemberdayaan atau dari *Women In Development (WID)* ke *Gender And Development (GAD)*.

Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi peran gender (tri peranan) dalam rumah tangga
Peranan gender diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu peranan produktif, peranan reproduktif dan kemasyarakatan atau kerja sosial / komunitas. Dalam Overholt & Austin (1991) dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Peran Produktif

Yaitu peran kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah (menghasilkan barang dan jasa) untuk dikonsumsi dan diperdagangkan. Kegiatan ini disebut juga kegiatan ekonomi karena menghasilkan uang secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya.

1.2. Peran Reproduksi

Yaitu peran kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggungjawab domestik atau kemasyarakatan.

1.3. Peran Kerja Sosial / Kemasyarakatan meliputi organisasi kolektif peristiwa dan pelayanan sosial. Moser membagi kerja komunitas ini menjadi dua jenis kerja yang berbeda yaitu:

- a. Kerja manajemen komunitas: aktifitas yang terutama dilakukan oleh kaum perempuan di tingkat komunitas sebagai perluasan peran produktifnya, menjamin persediaan dan pemeliharaan sumberdaya bagi masyarakat. Pekerjaan ini adalah kerja sukarela yang tidak dibayar dan dilakukan dalam waktu luang.
- b. Kerja politik komunitas: aktifitas yang terutama dilakukan oleh laki-laki di tingkat komunitas, pengorganisasian di tingkat politik formal. Kerja ini biasanya merupakan kerja yang dibayar secara langsung ataupun tidak langsung melalui status atau kekuasaan.

Kaum perempuan dan laki-laki seringkali terlibat dalam tiga peranan diatas. Laki-laki mungkin saja tidak banyak berperan dalam kegiatan reproduksi, melainkan kerja produktif. Menurut Overholt & Austin (1991) pada masyarakat kaum perempuan

mengerjakan hampir semua kegiatan reproduktif dan kegiatan produktif.

2) Penilaian Kebutuhan Gender (*Gender Need Assesment*)

Kebutuhan gender dibedakan dalam kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kebutuhan Praktis Gender

Adalah pemenuhan kebutuhan individu jangka pendek yang bertujuan mengubah kehidupan melalui kebutuhan dasar. Tetapi kebutuhan praktis gender tidak akan merubah posisi perempuan yang subordinat.

2. Kebutuhan Strategis Gender

Adalah pemenuhan kebutuhan jangka panjang yang bertujuan mengubah peran gender perempuan agar perempuan dan laki-laki dapat berperan adil dalam pembangunan.

Pada penilaian kebutuhan gender pertanyaan kuncinya adalah apakah kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender yang dibutuhkan oleh perempuan dan laki-laki, apakah suatu program intervensi telah mampu menjawab kebutuhan praktis dan strategis gender.

3) Menggunakan Matriks Kebijakan WID (*Women In Development*) atau menggunakan matriks kebijakan GAD (*Gender And Development*)

Matriks ini memberikan suatu kerangka untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang sedang atau digunakan dalam program intervensi.

Tabel 2.3. Matriks Kebijakan WID (*Women In Development*) dan GAD (*Gender And Development*)

<i>Women In Development (WID)</i>	<i>Gender And Development (GAD)</i>
Pendekatan	
Pendekatan yang memandang perempuan sebagai masalah	Pendekatan yang memandang perempuan berperan penting untuk pembangunan

Fokus	
Perempuan	Relasi antar laki-laki dan perempuan
Kebutuhan praktis perempuan	Kebutuhan strategis perempuan
Masalah	
Pengesampingan perempuan dalam proses pembangunan	Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang (kaya-miskin, laki-laki-perempuan) yang menghambat pembangunan adil/seimbang dan partisipasi perempuan yang optimal
Tujuan	
Pembangunan yang efisien dan efektif Meningkatkan keikutsertaan perempuan Perubahan kondisi perempuan	Pembangunan yang adil dan berkesinambungan yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan Mengintegrasikan pertimbangan gender dalam pembangunan Perubahan kedudukan perempuan
Solusi	
Integritas perempuan dalam proses pembangunan	Pemberdayaan kaum lemah dan perempuan Merubah hubungan yang tidak seimbang
Strategi	
Proyek untuk perempuan Unsur-unsur perempuan Peningkatan produktivitas perempuan Peningkatan pendapatan perempuan Peningkatan kemampuan perempuan dalam pengelolaan rumah tangga	Identifikasi dan penanganan kebutuhan praktis dan strategis perempuan dan laki-laki untuk memperbaiki keadaan mereka. Dalam waktu yang sama penanganan minat strategis perempuan

Dengan menggunakan analisis gender kerangka Moser maka kita dapat mengidentifikasi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender yang sangat bermanfaat untuk mengetahui dampak suatu intervensi kebijakan terhadap relasi gender.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis gender kerangka Moser dikarenakan pada model analisis gender kerangka Moser salah satu tujuannya adalah membantu pembuat perencana program untuk memahami bahwa kebutuhan-kebutuhan perempuan dan laki-laki adalah berbeda. Selain itu pada analisis gender kerangka Moser ini disampaikan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui pemberdayaan dengan memperhatikan kebutuhan praktis dan kebutuhan

strategis gender, sehingga sesuai dengan fokus penelitian ini yakni mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui program CSR.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui sinergitas peran gender dalam program pemberdayaan masyarakat. Selain itu penelitian ini menggunakan analisis gender kerangka Moser tujuannya tidak untuk mendesain program, melainkan untuk mengidentifikasi, belajar (*lesson to learn*) tentang *sukses story* suatu program CSR yang sampai saat ini *sustainability* programnya masih terjaga dengan baik dan perempuan memiliki partisipasi yang tinggi dalam program CSR tersebut.

3. CSR Sebagai Upaya Perusahaan Mensejahterakan Masyarakat

Adanya berbagai tuntutan dan semakin meningkatnya kesadaran dari perusahaan terkait dengan keharusan untuk bertanggungjawab secara sosial dan berlaku etis dalam menjalankan bisnisnya maka konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Hart (2010) bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perkembangannya menjadi alat perusahaan yang digunakan secara taktis untuk meredam kritik dan melindungi citra perusahaan atau juga dapat dijadikan alat yang efektif dalam masyarakat yang demokratis untuk membuat perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan menciptakan etos bisnis yang berkelanjutan.

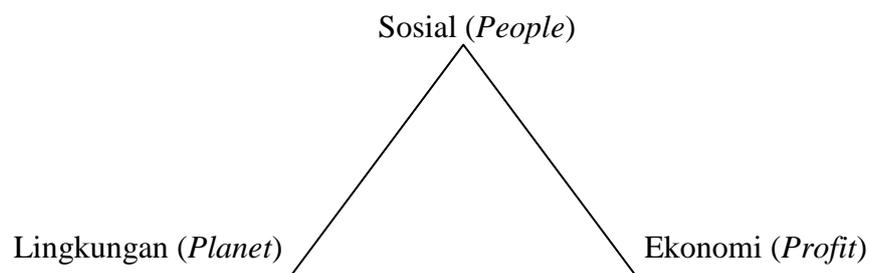
Sedangkan Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan dari praktek bisnis dan bentuk kontribusi dari sumber daya perusahaan. Inti dari pengertian tersebut tidak mengacu pada aktivitas bisnis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku namun lebih pada komitmen kerelawanan perusahaan sehingga dipilih dan diimplementasikan dalam praktek bisnisnya.

Dengan kata lain, *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini telah menjadi cermin pembangunan sosial dalam masyarakat yang demokratis, sehingga *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya perusahaan untuk membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan pendekatan yang seimbang sehingga dapat menjadi alat perusahaan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

a. Pengertian *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Konsep dari CSR mengandung arti bahwa organisasi bukanlah sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Konsep CSR menurut CSR Asia terdiri atas “Triple bottom line”, menurut Jhon Elkington (1997) bahwa jika perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3 P” (Profit, People dan Planet). Perusahaan dalam mengejar keuntungan (*Profit*) harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*People*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*).



Gambar.2.1
Hubungan antara *Profit*, *People* dan *Planet* (3P)

Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, tetapi lebih dari itu mereka juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini (*planet*). “Profit” diartikan sebagai wujud aspek ekonomi,

“planet” sebagai wujud aspek lingkungan dan “people” sebagai aspek sosial atau masyarakat. Pendapat John Elkington terhadap konsep CSR memberikan perhatian yang lebih luas bagi perusahaan dalam melakukan praktik bisnisnya. Perusahaan dituntut untuk memahami kebutuhan lingkungan sebagai sumber daya yang harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya sehingga bisa terus dinikmati oleh generasi masa sekarang dan tetap dinikmati oleh generasi berikutnya, dengan kata lain sebagai wujud timbal balik antara perusahaan dan lingkungan masyarakat yang telah mendapat keuntungan dari sumber daya alam tersebut.

Menurut Shiramesh (2007), *CSR is necessary for corporations to go beyond their economic and legal obligations, and act responsibly towards multiple stakeholders including social at large*. Bahwa CSR diperlukan bagi perusahaan untuk melakukan kewajiban ekonomi dan hukum mereka dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap beberapa stakeholder termasuk pada masyarakat pada umumnya .

Sedangkan Daft (2006), *CSR is responsibility of the management, which is to contribute to the welfare of the society. CSR is considered as an obligations which is beyond their legal and economic to gain long term objective that is to benefit the society*. Bahwa CSR adalah tanggung jawab manajemen yaitu untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. CSR dianggap sebagai kewajiban yang berada di luar hukum dan ekonomi untuk mendapatkan tujuan jangka panjang yang menguntungkan bagi masyarakat .

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD:2000) dalam Rusdianto (2013:7) mendefinisikan tentang CSR sebagai berikut: *“CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of live of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”*. Definisi tersebut mengungkapkan bahwa CSR adalah komitmen bisnis untuk

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan berikut komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Caroll (1979) berpendapat agar definisi tanggung jawab sosial sepenuhnya menggambarkan jangkauan kewajiban bisnis terhadap masyarakat, definisi tersebut harus mengandung kategori kinerja ekonomi, hukum, etika dan diskresioner. Tanggung jawab ekonomi menempati urutan teratas karena pada dasarnya bisnis memiliki kewajiban untuk menjadi produktif dan menghasilkan profit serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Namun tanggung jawab ekonomi harus dilakukan dalam batasan hukum tertulis. Tanggung jawab etika berjalan sesuai norma dan nilai yang berjalan di masyarakat, berada di luar batas-batas hukum. Sementara tanggung jawab diskresioner bersifat filantropi yang dilakukan dengan sukarela.

Menurut ISO 26000 dalam Rusdianto (2013:7), CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi diseluruh aktivitas organisasi dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan produk maupun jasa.

Meskipun memiliki banyak pengertian namun secara esensi CSR merupakan wujud dari *giving back* dari perusahaan kepada komunitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada komunitas (*stakeholders*).

b. Prinsip - Prinsip *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

CSR adalah aktivitas pada perusahaan yang sangat membutuhkan perhatian dan ketepatan dalam penerapannya karena perusahaan

memiliki stakeholders dengan bermacam-macam kepentingan dan tipe yang berbeda dari perusahaan. Untuk memudahkan Crowther David (Hadi, 2011) menguraikan prinsip-prinsip CSR menjadi tiga yaitu:

1). *Sustainability*

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.

2). *Accountability*

Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan.

3). *Transparency*

Merupakan prinsip penting dilakukan karena transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikudampak terhadap pihak eksternal. Transparansi berperan mengurangi kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Menurut ISO 26000 terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan CSR, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Kepatuhan kepada hukum.
- 2) Menghormati instrumen badan-badan internasional.
- 3) Menghormati stakeholders dan kepentingannya.
- 4) Akuntabilitas.

- 5) Transparansi.
- 6) Perilaku yang beretika.
- 7) Melakukan tindakan pencegahan.
- 8) Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Sementara itu, Hudayana (2011) menyebutkan bahwa “*CSR practitioners are often not sensitive to local wisdom of the community where the company operates. CSR should be sensitive to the needs and have sound knowledge of the local wisdom. The should support the social development of the society and improve trustworthiness of the business*”. CSR sering tidak peka terhadap kearifan lokal masyarakat di mana perusahaan beroperasi. CSR seharusnya memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal. CSR juga semestinya mendukung pengembangan sosial masyarakat setempat dan mampu meningkatkan kepercayaan bisnis .

Menurut Kayuni and Tambulasi (2012) dalam Rudito (2013) “*CSR efforts will also heavily depend on the culture of the community. Many of CSR programs that are not in accordance whit the need of community since there is lack of base line data of the community and the lack of corporate to do such a need assesment including socio-culture aspect*”. Selain itu CSR juga akan tergantung pada budaya masyarakat. Banyak dari program CSR yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena ada kurangnya baseline data masyarakat setempat dan kurangnya perusahaan untuk melakukan seperti *assesment* kebutuhan termasuk aspek sosial dan budaya. Sebelum melaksanakan program CSR, perusahaan harus memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memahami karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang merupakan sasaran program CSR. (Almaeshi, 2006).

Program CSR harus berbasis pada kebutuhan, lokal isu, budaya dan tradisis serta histori masyarakat setempat yang menjadi penerima manfaat program CSR. (Chapple & Moon, 2005). Dengan memahami karakteristik masyarakat seperti *local wisdom* masyarakat setempat merupakan *social*

capital yang dapat digunakan untuk menciptakan dan mengembangkan *sustainability* program CSR. (Afitri, 2011).

c. Manfaat Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Pelaksanaan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Aktivitas CSR memiliki fungsi strategis bagi perusahaan yaitu sebagai bagian dari manajemen resiko sehingga diharapkan perusahaan tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek melainkan harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup jangka panjang.

Adapun manfaat pelaksanaan CSR bagi perusahaan menurut Rudito (2013:13) adalah sebagai berikut.

1. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Mengurangi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
5. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
6. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
7. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
8. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
9. Mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*).

d. Dimensi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Sen dan Battacharya (2001) mengidentifikasi terdapat enam hal pokok yang termasuk dimensi dalam *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) diantaranya adalah:

- 1) *Community support*: dukungan sponsor dan amal, program-program pendidikan, kesehatan, kesenian dan sebagainya.
- 2) *Diversity*: kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan konsumen, pekerja dalam hal gender, fisik ataupun ras-ras tertentu
- 3) *Employee support*: perlindungan terhadap tenaga kerja, insentif dan penghargaan serta keselamatan kerja,

- 4) *Environment*: menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik, produk-produk ramah lingkungan dll,
- 5) *Non-U.S operation*: perusahaan bertanggungjawab untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapatkan kesempatan bekerja antara lain membuka pabrik di luar negeri (*abroad operation*),
- 6) *Product*: perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk yang aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset pengembangan produk secara kontinyu dan menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang (*recycled*).

e. Bentuk Aktivitas *Corporate Social Responsibility*(CSR)

Kotler dan Lee (2005) mengidentifikasi enam (6) pilihan program bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai wujud komitmen dari tanggung jawab sosial perusahaan. Keenam pilihan sebagai motif perusahaan melakukan CSR, yaitu:

1). *Cause promotions* (promosi kegiatan sosial)

Bentuk *Cause Promotions* merupakan bentuk komitmen perusahaan dengan memberikan kontribusi dana atau model penggalan dana dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu.

2). *Cause related marketing* (pemasaran terkait kegiatan sosial)

Perusahaan menyisihkan sepersekian persen dari pendapatan perusahaan sebagai bentuk kontribusi perusahaan bagi masalah sosial tertentu untuk periode atau jenis produk tertentu. Bentuk ini dengan kata lain merupakan donasi perusahaan sebagai wujud komitmen perusahaan.

3). *Corporate social marketing* (pemasaran kemasyarakatan perusahaan)

Perusahaan membantu pengembangan maupun implementasi dari kegiatan kampanye dengan tujuan fokus untuk merubah perilaku tertentu yang bisa berdampak negatif.

4). *Corporate philanthropy* (kegiatan filantropi perusahaan)

Perusahaan berinisiatif dengan memberikan secara langsung kontribusi dalam bentuk donasi atau sumbangan tunai kepada suatu kegiatan amal.

- 5). *Community volunteering* (pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela)

Komitmen yang dilakukan perusahaan berupa aktivitas memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat membantu masyarakat setempat.

- 6). *Socially responsibility bussiness practices* (praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial)

Memberikan dukungan dalam pengembangan masyarakat yang disesuaikan dengan usaha atau kegiatan bisnis masyarakat.

f. Model Kegiatan CSR

Untuk melihat bagaimana perusahaan dalam menerapkan CSR terdapat 3 (tiga) tipologi perusahaan yang dapat dikelompokkan menjadi perusahaan nakal, perusahaan licik, perusahaan baik, dan perusahaan maju. Dua tipe perusahaan pertama responnya cenderung masih negatif, yakni melawan atau menyembunyikan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran pihak internal perusahaan dan tekanan pihak eksternal (publik, media masa, *stakeholders*). Tipe perusahaan baik dan perusahaan maju merespon CSR. Sedangkan perusahaan nakal cenderung tidak melaksanakan apa-apa atau hanya melakukan CSR yang bersifat karikatif. Sedangkan perusahaan maju melakukan CSR berdasarkan kaidah-kaidah *Community Development* dan bahkan melesat jauh dengan menerapkan prinsip-prinsip investasi sosial (Suharto. 2010).

Tabel 2.4. Tipologi Perusahaan dalam Menerapkan CSR

TIPE PERUSAHAAN	RESPON	SPEKTRUM PENDEKATAN
Perusahaan Nakal	Melawan	<i>Zero to charity (hit and run)</i>
Perusahaan Licik	Menyembunyikan	<i>Charity of Philantrophy (kiss and run)</i>
Perusahaan Baik	Menyesuaikan	<i>Community relations to community development</i>

Perusahaan Maju	Mengembangkan	<i>Community development to social investment</i>
-----------------	---------------	---------------------------------------------------

Sumber: *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*. Suharto. E. 2010.

Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR menurut Suharto (2010) sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Minimalis adalah perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan Lemah biasanya termasuk katagori ini
- (2) Perusahaan Ekonomis adalah perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah.
- (3) Perusahaan Humanis adalah meskipun profit perusahaan rendah, proporsi anggaran CSR-nya relative tinggi. Disebut perusahaan dermawan atau baik hati.
- (4) Perusahaan Reformis adalah perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju.

Sedangkan berdasarkan Tujuan CSR menurut Suharto (2010) apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat:

- (1) Perusahaan *Pasif* adalah perusahaan yang meerapkan CSR tanpa tujuan jelas: bukan untuk promosi, bukan pula untuk pemberdayaan. Sekedar melakukan kegiatan karikatif. Perusahaan seperti ini melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2) Perusahaan *Impresif* dimana CSR lebih diutamakan untuk promosi daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “tebar pesona” ketimbang tebar karya”.
- (3) Perusahaan *Agresif* dimana CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan ketimbang promosi. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan karya nyata ketimbang tebar pesona.

- (4) Perusahaan *Progresif* dimana perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan

4. Komunikasi Sebagai Alat Perubahan Sosial (*Social Change*) Dalam Pembangunan Masyarakat

Dalam hubungannya dengan proses perubahan sosial (*social change*), komunikasi menjadi sebuah alat dalam melakukan perubahan sosial (*social change*) itu sendiri. Dalam hal ini komunikasi berperan untuk menjembatani perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Komunikasi merupakan perekat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpa komunikasi. Struktur sosial juga diciptakan dan ditopang melalui adanya komunikasi. Bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi pun adalah untuk menciptakan struktur-struktur sosial.

Hubungan antara perubahan sosial dengan komunikasi pernah diamati oleh Goran Hedebrö (dalam Nurudin, 2004) hasilnya bahwa tidak ada perubahan dalam masyarakat tanpa adanya peran komunikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi berperan penting dalam proses perubahan sosial.

Meskipun dikatakan bahwa komunikasi hadir dengan tujuan membawa perubahan, namun ia bukan satu-satunya alat dalam membawa perubahan sosial. Dengan kata lain, komunikasi hanya salah satu dari banyak faktor yang menimbulkan perubahan masyarakat.

Menurut Nurudin (2004) komunikasi sebagai proses sosial adalah bagian integral dari masyarakat. Secara garis besar komunikasi sebagai proses sosial di masyarakat memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Komunikasi menghubungkan antar berbagai komponen masyarakat. Komponen di sini tidak hanya individu dan masyarakat melainkan berbagai bentuk lembaga-lembaga sosial seperti pers, humas, dan universitas.

- 2) Komunikasi yang menghubungkan antar berbagai komponen masyarakat dapat membuka dan menciptakan peradaban (*civilization*) baru bagi manusia.
- 3) Komunikasi merupakan sebuah manifestasi kontrol sosial dalam masyarakat.
- 4) Komunikasi berperan dalam sosialisasi nilai ke masyarakat.
- 5) Seseorang akan diketahui jati dirinya sebagai manusia karena menggunakan komunikasi.

Proses komunikasi bagi perubahan sosial ditekankan pada bagaimana informasi-informasi disebar, bagaimana upaya untuk memperoleh informasi dipacu, bagaimana kepercayaan dibangun di antara anggota masyarakat dan oleh anggota masyarakat. Selain itu pesan yang diciptakan, dikirim, diterima dan direspon oleh masyarakat, hendaknya merupakan bagian dari sebuah proses mendengarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara dua arah.

Adapun jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk pesan komunikasi yang diciptakan akan mampu menggerakkan perilaku dan atau sikap, membangkitkan kesadaran dan pemahaman atas isu yang ada dalam masyarakat, menciptakan kesadaran sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk memajukan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, proses komunikasi untuk perubahan sosial harus diciptakan dan dikembangkan serta diarahkan pada upaya memberdayakan masyarakat dan menciptakan perubahan sosial atau kemajuan bagi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

a. Pengertian Komunikasi

Pengertian komunikasi menurut Laswell dalam Sendjaja (2004:11) merupakan proses yang menjelaskan siapa?, mengatakan apa?, kepada siapa?, dan dengan akibat atau hasil apa atau *who, say what, in which channel, to whom, and with what effect*. Sedangkan komunikasi sebagai sebuah proses Miller (2002) mengemukakan bahwa komunikasi dapat dilihat melalui tiga hal yaitu : (1). *Communication is a process*, (2).

Communication is transactional dan (3).Communication is symbolic. Communication is a process menurut David Berlo adalah komunikasi merupakan suatu proses dimana setiap peristiwa dan relasi-relasi yang terjadi bersifat dinamis, *on-going* selalu berubah dan berkesinambungan. Pada proses ini komunikasi tidak dapat dilihat kapan dimulai, dan kapan berakhir dan bagian-bagian yang jelas dari setiap prosesnya, karena komunikasi tidak statis, tidak pernah berhenti dan selalu bergerak. Dalam proses ini masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sedangkan *communication is transactional* bahwa komunikasi merupakan proses interaksi dimana antar partisipan komunikasi berpartisipasi secara aktif, saling memberi umpan balik, berbicara, merespon, melakukan aksi dan reaksi serta saling mempengaruhi. Dalam hal ini proses komunikasi menekankan semua perilaku adalah komunikatif dan masing-masing pihak yang terlibat didalamnya memiliki konten pesan yang dibawa dan saling bertukar dalam transaksi. (Sendjaja dalam Bungin, 2006). Selanjutnya *Communication is symbolic* adalah bahwa proses komunikasi melibatkan simbol-simbol baik verbal maupun non verbal yang saling berhubungan satu sama lain.

Lingkup komunikasi meliputi (Pawito, 2007) sebagai berikut:

1. Komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*).

Komunikasi antar pribadi pada dasarnya merupakan jalinan hubungan interaktif antara seorang individu dan individu lain, di mana lambang-lambang pesan secara efektif digunakan, terutama lambang-lambang bahasa.

2. Komunikasi kelompok (*group communication*)

Bidang kajian ini pada dasarnya mempelajari pola-pola interaksi antar individu dalam suatu kelompok sosial (kelompok kecil), dengan titik berat tertentu, misalnya pengambilan keputusan. Dalam komunikasi kelompok dan pengambilan keputusan, istilah kepemimpinan (*leadership*) sangatlah penting. Hal ini disebabkan

karena kepemimpinan memiliki dua fungsi, yaitu mempertahankan kelangsungan kelompok dan pencapaian tujuan.

3. Komunikasiorganisasional/institusional (*organizational/institutional communication*)

Komunikasi organisasional atau institusional berkenaan dengan komunikasi yang berlangsung dalam jaringan kerjasama antar pribadi dan atau antar kelompok dalam suatu organisasi atau institusi.

4. Komunikasi massa (*mass communication*)

Merupakan suatu bentuk komunikasi dengan melibatkan khalayak luas yang biasanya menggunakan teknologi media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet.

5. Komunikasi budaya (*cultural communication*)

Bidang kajian komunikasi budaya mencakup bentuk-bentuk ekspresi simbolik baik yang bersifat artefak, seperti lukisan, wayang, patung, gapura, candi, bangunan arsitektur, dan museum maupun yang bersifat nonartefak, seperti, tarian, nyanyian, teater, drama, musik dan puisi. Komunikasi kultural berkembang seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat, atau lebih tepatnya budaya masyarakat.

b. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Pengertian komunikasi interpersonal oleh Joseph A. Devito (2007), dalam bukunya "*The Interpersonal Communication Book*" sebagai : "proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik secara seketika". Jadi komunikasi merupakan proses pemindahan informasi dan pengertian antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing berusaha untuk memberikan arti pada pesan-pesan simbolik yang dikirim melalui suatu media yang menimbulkan umpan balik.

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi didalam diri sendiri. Didalam diri manusia terdapat komponen-komponen komunikasi seperti sumber, pesan, saluran penerima dan balikan.

Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lainnya. Misalnya percakapan tatap muka, korespondensi, percakapan melalui telepon, dan sebagainya.

Hubungan interpersonal (*interpersonal relationship*) merupakan suatu konsep yang penting dalam kajian komunikasi. Littlejohn dalam bukunya *Theories of Human Communication* mendefinisikan hubungan interpersonal sebagai seperangkat harapan diantara dua orang (anggota-anggotanya) mengenai perilaku mereka berdasarkan pola interaksi di antara mereka. Pentingnya hubungan dalam komunikasi didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut (Littlejohn, 2009) :

1. Hubungan (*relationship*) selalu terhubung dan tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi.
2. Pada dasarnya suatu hubungan dapat diartikan melalui komunikasi diantara anggotanya.
3. Hubungan selalu lebih diartikan secara implisit daripada eksplisit.
4. Hubungan berkembang seiring berjalannya waktu melalui proses negosiasi diantara anggota yang terlibat, sehingga jalinan hubungan ini bersifat dinamis.

c. Fungsi dan Tujuan Komunikasi Interpersonal

Fungsi komunikasi antar pribadi atau komunikasi *interpersonal* adalah berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu,

serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain (Cangara, 2012).

Komunikasi interpersonal, dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat seseorang bisa memperoleh kemudahan dalam hidupnya karena memiliki pasangan hidup. Melalui komunikasi interpersonal juga dapat berusaha membina hubungan baik, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik yang terjadi.

Sebagian komunikasi interpersonal memang memiliki tujuan, misalnya apa bila seseorang datang untuk meminta saran atau pendapat kepada orang lain. Akan tetapi komunikasi interpersonal dapat juga terjadi relatif tanpa tujuan atau maksud tertentu yang jelas, misalnya ketika seseorang sedang bertemu dengan kawannya dan mereka lalu saling bercakap-cakap dan bercanda (Pawito, 2007).

Namun demikian, menurut Widjaja (2000) ada enam tujuan komunikasi interpersonal yang dianggap penting yaitu :

1) Mengetahui diri sendiri dan orang lain

Melalui komunikasi interpersonal orang dapat belajar tentang bagaimana dan sejauh mana harus membuka diri dengan orang lain, dalam arti bahwa tidak serta merta menceritakan latar belakang kehidupan kepada setiap orang, tetapi dengan melalui komunikasi interpersonal dapat mengetahui nilai, sikap dan perilaku orang lain, serta dapat menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain.

2) Memungkinkan untuk memahami lingkungan secara baik

Melalui komunikasi interpersonal memungkinkan untuk bisa memahami lingkungan secara baik mengenai obyek, kejadian-kejadian dan orang lain.

3) Menciptakan dan memelihara hubungan baik antar personal

Komunikasi interpersonal bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain. Hal ini membantu

mengurangi ketegangan dan menciptakan perasaan positif terhadap diri sendiri.

4) Mengubah sikap dan perilaku

Komunikasi interpersonal sering kali dipergunakan untuk mempersuasi orang lain, untuk sikap dan perilakunya seperti yang diinginkan komunikator.

5) Mencari hiburan untuk pribadi

Berbagai pembicaraan-pembicaraan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh hiburan. Sering kali tujuan ini tidak penting, namun sebenarnya komunikasi interpersonal yang demikian perlu dilakukan, karena bisa memberi suasana yang lepas, keseriusan, ketegangan, kejenuhan dan sebagainya.

6) Membantu orang lain menyelesaikan masalah

Melalui komunikasi interpersonal, maka orang dapat memberikan nasihat, saran, pendapat kepada orang lain.

Fungsi global dari komunikasi antar pribadi adalah menyampaikan pesan yang umpan baliknya diperoleh saat proses komunikasi tersebut berlangsung.

d. Sifat Komunikasi Interpersonal

Menurut sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibedakan atas dua macam yaitu (Cangara, 2012) :

1. Komunikasi diadik (*Dyadic Communication*) ialah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik menurut Pace dapat dilakukan dalam 3 bentuk yakni:

- a. Percakapan : berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan informal.
- b. Dialog : berlangsung dalam situasi yang lebih intim, lebih dalam dan lebih personal.

- c. Wawancara : sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan pada posisi bertanya dan lainnya berada pada posisi menjawab.
2. Komunikasi kelompok kecil (*Small Group Communication*) ialah proses komunikasi yang berlangsung tiga orang atau lebih secara tatap muka, dimana anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Dan komunikasi kecil ini banyak dinilai dari sebagai tipe komunikasi antar pribadi karena :
 - a. Anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka.
 - b. Pembicaraan berlangsung secara terpotong-potong dimana semua peserta bisa berbicara dalam kedudukan yang sama, dengan kata lain tidak ada pembicaraan tunggal yang mendominasi.
 - c. Sumber penerima sulit diidentifikasi. Dalam situasi seperti saat ini, semua anggota bisa berperan sebagai sumber dan juga sebagai penerima. Karena itu, pengaruhnya bisa bermacam-macam.
 - e. **Teori Dialektika *Relationship* Dalam Komunikasi Interpersonal**

Ketika kita membahas tentang hubungan yang disebabkan adanya komunikasi yang dibangun maka Teori Leslie Baxter dalam buku Littlejohn (2009:298-306) tentang hubungan memberikan poin yang menguntungkan untuk memandang proses dialog hubungan ini. Menurut Littlejohn (2009), *relationship* bukanlah kesatuan statis yang tidak pernah berubah. Relationship dapat berwujud kata-kata, tindakan/perilaku, pengaruh, dan respon yang didalamnya terdapat timbal balik. Berdasarkan Palo Alto Group (dalam Littlejohn, 2009), ketika dua orang saling berkomunikasi didalamnya terdapat hubungan melalui serangkaian interaksi. Rangkaian tersebut akan menghasilkan respon yang berkelanjutan.

Teori dialektika relasional merupakan teori yang menggambarkan hubungan yang terjadi di dalam kehidupan sebagai sebuah proses yang konstan dan bergerak (West dan Turner, 2008). Pada dasarnya, manusia berharap untuk memiliki keduanya ketika berbicara tentang mencapai sebuah tujuan. Manusia di dalam hubungannya ingin saling terkoneksi satu

sama lain tapi tetap memiliki daerah privasi, terbuka namun memproteksi diri, serta memiliki prediksi walau kerap membutuhkan spontanitas di dalam interaksi yang terjadi. Kebutuhan yang saling bertentangan ini seringkali berusaha untuk diselesaikan namun manusia tidak akan pernah menghilangkan kebutuhan dari kedua hal yang bertolak belakang tersebut.

Hubungan tidak bersifat linear namun fluktuasi yang terjadi antara keinginan yang kontradiktif.

1. Hubungan dalam kehidupan dikarakteristikan dengan perubahan seiring berjalannya waktu.
2. Kontradiksi adalah kenyataan fundamental dari hidup berhubungan yang tidak pernah berhenti untuk menimbulkan ketegangan, tergantung bagaimana cara mengelola ketegangan dan oposisi tersebut.
3. Komunikasi merupakan hal yang sentral untuk mengelola, mengorganisasi dan menegosiasikan kontradiksi hubungan yang terjadi secara baik.

Komunikasi dialektis disini diartikan hubungan merupakan tempat yang menangani pertentangan. Dialektis mengacu pada tekanan antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan dalam sebuah sistem (Leslie A Baxter dalam Littlejohn, 2009). Studi Baxter dan Montgomery telah memfokuskan pada tiga dialektika relasional menyeluruh yang mempengaruhi hampir setiap hubungan dekat yaitu : (1).integrasi dan pemisahan, (2). stabilitas dan perubahan dan (3). ekspresi dan non ekspresi (Leslie A Baxter, 1990). Selain itu juga menurut Leslie A Baxter terdapat dialektika internal dan dialektika eksternal seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Tipe Ketegangan Dialektis yang Dialami Mitra Relasional

	Dialektika Internal	Dialektika Eksternal
Penyatuan-Pemisahan	Koneksi - Otonomi	Inklusi - Seklusi
Stabilitas -Perubahan	Kepastian - Ketidakpastian	Konvensionalitas - Keunikan
Ekspresi - Nonekspresi	Keterbukaan - Ketertutupan	Pengungkapan - Penyembunyian

Based on Baxter and Montgomery, Relating: Dilalog and Dialectics

Dialektika internal menjelaskan tiga dialektika yaitu koneksi-otonomi, kepastian-ketidakpastian dan keterbukaan-ketertutupan karena ketiganya berperan di dalam sebuah hubungan. Dialektika eksternal menyebut tarikan serupa yang menyebabkan ketegangan antara komunitas diantaranya inkusi-seklusi, konvensionalitas-keunikan, pengungkapan-penyembunyian. Pada penelitian ini yang terjadi adalah dialektika yang bersifat eksternal dimana terjadi antar perusahaan dan masyarakat.

Inklusi-Seklusi dalam konsepsi teori Baxter menjelaskan bahwa pasangan membutuhkan orang-orang sekitar dalam kehidupan mereka, tetapi tidak sepenuhnya masuk dan tidak menjadikan pasangan bergantung pada orang lain sehingga dapat membahayakan hubungan intim mereka.

Konvensional-Keunikan pada teori Baxter mengungkapkan nilai-nilai yang dianut pasangan baik secara konvensional dan keunikan akan mempengaruhi hubungan.

Penyembunyian-pengungkapan dalam teori Baxter dimaknai bahwa ketegangan yang terjadi pada suatu hubungan intim dalam mengungkapkan atau menyembuyikan sesuatu kepada orang diluar pasangannya.

f. Teori Dialogis *Relationship* Dalam Komunikasi Interpersonal

Sebagai suatu jalinan yang terhubung dengan dialektis, dialog diartikan sebagai percakapan yang mendefinisikan ulang hubungan ketika hubungan muncul dalam situasi sebenarnya (Leslie A Baxter dalam Littlejohn 2009). Dalam kajian mengenai dialog, Bakhtin dalam Littlejohn (2009), membantu memahami hubungan pada masyarakat sebagai proses berjalan membentuk ungkapan/ucapan dan melibatkan dialog dengan lainnya.

Gagasan Bakhtin terpusat pada dialog. Dialog merujuk pada bagaimana individu berinteraksi dalam interaksi khusus. Sementara inti konsepsi dialog adalah ucapan/ungkapan. Sebuah ucapan mengacu pada bahasa yang diucapkan pada konteks. Komunikator mengungkapkan gagasan dan membuat penilaian tentang itu, mengantisipasi beberapa

respon dari orang yang bersangkutan. Selain itu, orang juga ikut serta merespons, menilai, dan menanggapi dengan ucapannya sehingga dialog adalah sebuah jaringan hubungan dengan orang lain yang kompleks. Dialog tidak akan pernah berakhir, karena merupakan bahasa kontekstual yang berlanjut dan berkembang. Dialog juga mampu membentuk kebudayaan, karena setiap interaksi dialogis merupakan sebuah pandangan terhadap setiap kebudayaan dari pendirian tertentu.

Dialog merupakan sebuah estetika dan wacana. Sebagai estetika karena memberikan identitas hubungan, keunikan, dan kesatuan. Sedangkan sebagai wacana karena pentingnya komunikasi/percakapan dalam interaksi yang kemudian menghasilkan wacana, tidak hanya sebatas kognitif saja.

Leslie A Baxter dalam EM. Griffin (2009), menekankan lima hubungan dialogis pada pemikiran Bakhtin. Namun dalam perkembangannya Leslie A Baxter menjadi lebih fokus pada implikasi relasional dari konsep Mikhail Bakhtin tentang dialog, yaitu :

1. Dialog sebagai proses yang membangun (*Dialogue as a Constitutive Process*)

Leslie A Baxter menyatakan, pendekatan yang membangun pada komunikasi bertanya tentang bagaimana komunikasi menjelaskan dan mengkonstruksikan dunia sosial, termasuk diri dan hubungan personal kita. Pendekatan ini mengusulkan, komunikasi menciptakan dan menyokong suatu hubungan. Jika praktik komunikasi suatu pasangan berubah, maka hubungan mereka pun berubah pula. Pandangan dialogis mempertimbangkan perbedaan dan kesamaan pada orang-orang menjadi sama pentingnya. Keduanya tercipta dan dievaluasi melalui dialog yang dibangun pasangan. Perbedaan memusatkan pada apa arti dari perbedaan ini bagi pasangan dan bagaimana mereka bertindak atas arti-arti tersebut. Di lain sisi, persamaan akan sikap-sikap, latar belakang, dan minat dapat merekatkan bersama orang-orang secara positif.

2. Dialog sebagai aliran dialektis (*Dialogue as Dialectical Flux*)

Sebagaimana yang dipercaya Bakhtin dan Baxter, seluruh kehidupan sosial merupakan produk dari “penyatuan yang dikuasai kontradiksi dan penuh ketegangan dari dua hasrat yang bersengketa.” Eksistensi ini mengkontraskan serangan-serangan, berarti bahwa mengembangkan dan mempertahankan hubungan menjadi proses yang sulit ditebak, tidak bisa terselesaikan, dan tidak bisa dipastikan. Karena hubungan diciptakan melalui dialog yang selalu berada dalam aliran. Leslie A Baxter berpikir, seharusnya tak perlu terkejut bahwa konstruksi ini berjalan tidak semestinya.

3. Dialog sebagai momen estetis (*Dialogue as an Aesthetic Moment*)

Leslie A Baxter menggambarkan dialog sebagai pencapaian estetis, “suatu sensasi sejenak dari kesatuan melalui penghargaan mendalam bagi suara-suara yang berbeda pada dialog.” Sensasi timbal balik tersebut dari penyempurnaan, pelengkapan, atau keseluruhan di tengah pengalaman yang terfragmentasi tersebut tidak berlangsung lama. Namun, kenangan saat-saat yang indah dapat mendukung pasangan melalui turbulensi yang terjadi pada hubungan yang akrab.

4. Dialog sebagai ungkapan (*Dialogue as Utterance*)

Ungkapan digambarkan sebagai penghubung ekspresif yang mana hanya satu dari banyak komunikasi yang membentuk rantai dialog. Oleh karena itu, ungkapan yang disetujui dipengaruhi kata-kata yang keluar sebelumnya dan kata-kata yang akan digunakan. Leslie A Baxter menekankan pada apakah ungkapan memberi kepercayaan pada suara-suara kedua belah pihak dalam suatu hubungan atau tidak.

5. Dialog sebagai sensibilitas kritis (*Dialogue as a Critical Sensibility*)

Sensasi kelima ini adalah suatu kewajiban untuk mengkritik suara yang dominan, khususnya mereka yang menekankan pandangan-pandangan yang berlawanan.

B. Kerangka Pemikiran

1. Hasil Penelitian Pendahuluan

Berdasarkan hasil studi pendahuluan bahwa masalah sampah di Kabupaten Cilacap merupakan masalah yang serius. Hal ini disebabkan karena perbandingan tonase sampah yang dihasilkan per hari, dengan jumlah truk pengangkut sampah yang ada belum berimbang. Dalam sehari volume sampah di wilayah kota Kabupaten Cilacap mencapai 646,5 meter kubik sampah ini setara dengan sekitar 92 muatan truk sampah.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, sehingga banyak yang membuang sampah tanpa dikelola dengan baik dan inilah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia diikuti dengan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume sampah dari hari ke hari dan makin beragamnya jenis sampah seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/atau yang sulit diurai oleh proses alam. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap, dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah dan menghambat sirkulasi tanah, aliran air dan akhirnya lingkungan menjadi rusak dan tidak sehat. Dengan demikian permasalahan sampah tidak hanya dapat ditanggulangi oleh pemerintah setempat, melainkan perlu peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk pihak swasta (perusahaan) dan seluruh masyarakat kota Cilacap agar penanganan sampah lebih efektif.

Tidak hanya pemerintah Kabupaten Cilacap saja yang harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan ini, melainkan seluruh elemen masyarakat baik masyarakat maupun pihak swasta (perusahaan) juga harus berpartisipasi ikut memberikan solusi terhadap masalah sampah. Permasalahan sampah memerlukan solusi khususnya bagaimana mengedukasi masyarakat untuk berperilaku sehat dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara mengurangi dampak negatif dari sampah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah membuat sistem pengelolaan sampah yang baik melalui Bank Sampah Mandiri.

Program Bank Sampah Mandiri ini merupakan inisiasi dari warga masyarakat di RW X Ketapang Damai Kelurahan Kebonmanis Cilacap Utara. Pelopor Bank Sampah ini adalah Bapak Moh Nor Hidayat yang menjadi pengagas utama diperlukannya sebuah sistem pengelolaan sampah yang baik agar dapat mengurangi dampak negatif sampah. Bank Sampah Mandiri ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk memberikan solusi aktif terhadap permasalahan sampah di Kabupaten Cilacap. Hal ini terkait semakin meningkatnya volume sampah dan daya tampung TPA yang sudah tidak mampu menampung sampah di Kabupaten Cilacap. Selain itu adanya Bank Sampah Mandiri ini merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam ikut berpartisipasi terkait kewajiban yang ada dalam UU 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di mana masyarakat wajib untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan dengan cara melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik di level rumah tangga. Dalam hal ini, Bank Sampah Mandiri sendiri hadir untuk menampung sampah anorganik. Sedangkan untuk sampah organik akan dilakukan pengelolaan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Cilacap dengan menggunakan fasilitas yang ada pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Sejak bulan Desember 2012 PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* ikut berpartisipasi aktif memberikan solusi terhadap permasalahan sampah di Kabupaten Cilacap melalui program CSR Bank Sampah Mandiri dimana program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat kerjasama antara PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant*, pihak pemerintah Kabupaten Cilacap dan PNPM Mandiri. Adapun lokasi pemberdayaan masyarakat dilakukan di Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Ketapang Damai RW X, kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Tujuan dari program Bank Sampah Mandiri Sejahtera adalah (1) Membantu Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengatasi mengurangi sampah di Kabupaten Cilacap, (2). Mengaktifkan peran serta masyarakat mulai dari level bawah RT/RW, lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten

Cilacap terutama sekolah, pasar/perdagangan, perkantoran dan lain-lainya untuk mengurangi sampah dan menjadikan sampah tersebut bermanfaat dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, (3). Membantu mengatasi permasalahan kesehatan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung, (4). Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat/rumah tangga, (5). Membangun kesadaran di masyarakat tentang pentingnya memilah, mengelola sampah dan menjadikannya sebagai barang yang bernilai ekonomis guna memberikan tambahan penghasilan dan (6). Memberikan pinjaman atau pembelian sembako pada masyarakat yang membutuhkan dengan pengembalian dan pembayaran dalam bentuk sampah yang layak jual dengan bergabung dengan Bank Sampah Mandiri. (Dokumen Bank Sampah Mandiri, 2014).

Adapun kegiatan pokok dari Bank Sampah Mandiri adalah kegiatan menabung sampah, dimana masyarakat memilah sampah di rumah tangga mereka masing-masing kemudian dikumpulkan sesuai jenisnya dan dikirim ke bank sampah untuk ditimbang dan hasilnya dimasukkan ke buku tabungan. Bagi nasabah Bank Sampah Mandiri juga dapat mempergunakan kartu tabungan sebagai alat pembayaran untuk membeli sembako, membayar tagihan listrik dan telepon, serta membayar laundry dengan menggunakan alat pembayarannya sampah di warung sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Bank Sampah Mandiri Bapak Moh Nurhidayat, sampai saat ini jumlah nasabah Bank Sampah Mandiri mencapai 282 Orang yang terdiri 153 Orang atas nama perempuan dan 129 orang laki-laki yang berasal dari masyarakat sekitar dan dari sekolah diantaranya SMA 3 Cilacap, SDN 5 Gumilir, TK Al-Azhar, dan SDN I Kebonmanis.

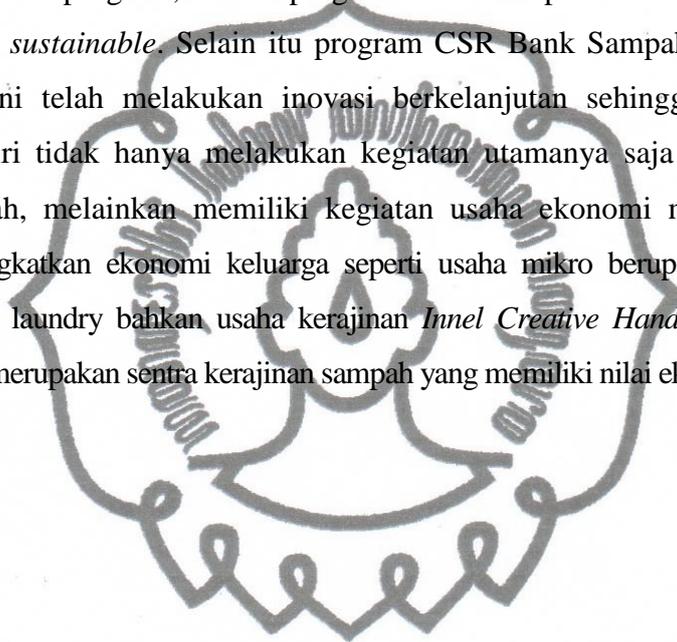
Berdasarkan data terpilah, nasabah Bank Sampah Mandiri yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Susi Sumanti selaku staf *Community Relations* PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant, masyarakat penerima manfaat Bank

Sampah Mandiri memang banyak dari ibu-ibu terutama ibu rumah tangga yang lebih telaten dan teliti dalam memilah sampah dan selanjutnya ditabung di Bank Sampah Mandiri. Hal ini sangat terkait dengan karakteristik masyarakat tempat Bank Sampah Mandiri beroperasi, secara sosial dan ekonomi kebanyakan berada pada tingkat ekonomi menengah dan ibu-ibu di wilayah RW X banyak yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang di rumah (kurang produktif) dalam kegiatan ekonomi rumah tangga akan tetapi sebenarnya memiliki daya kreatifitas yang baik.

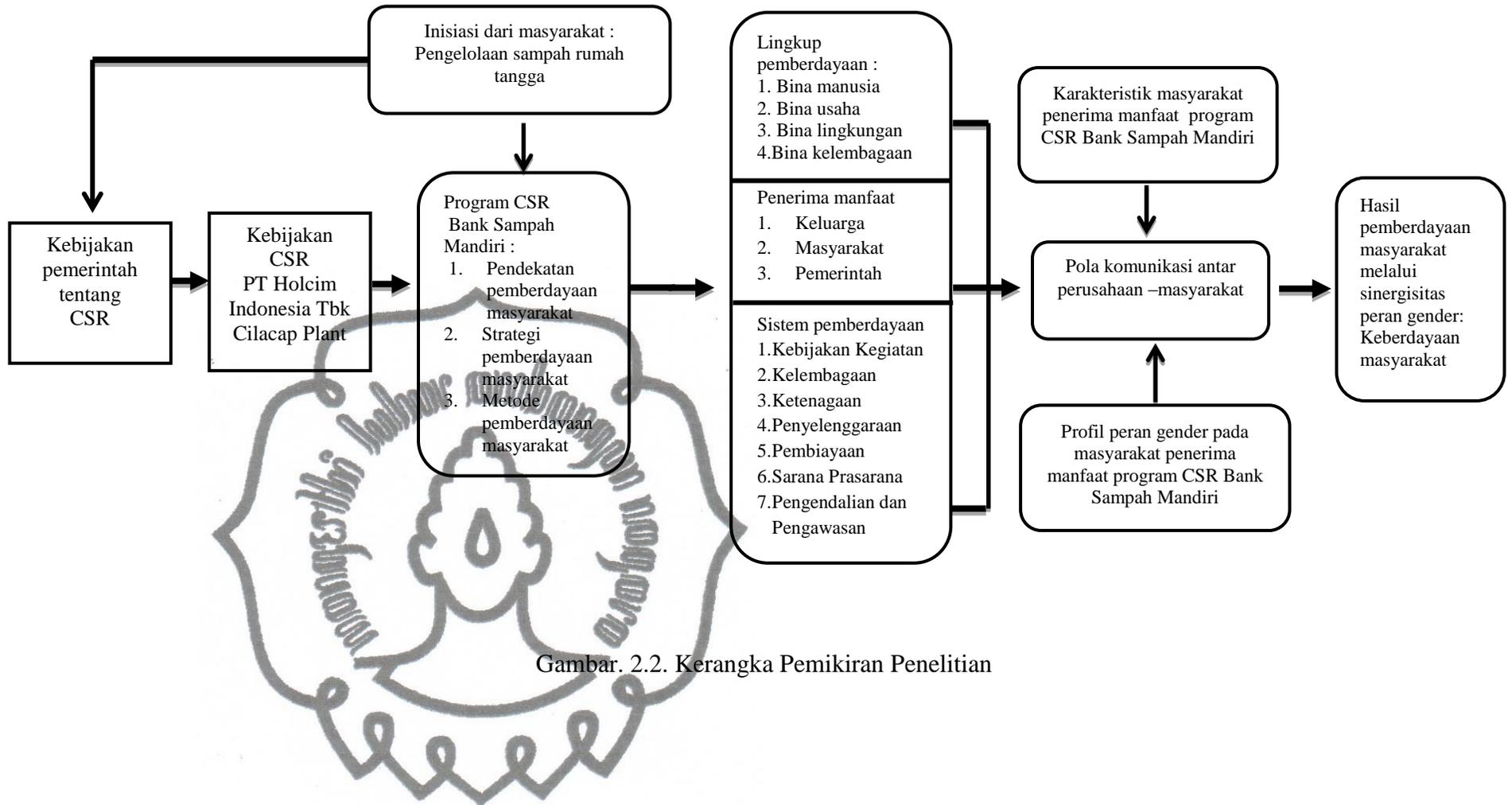
Di wilayah ini prosentase jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang tidak bekerja pada sektor publik, melainkan bekerja mengurus urusan domestik rumah tangga. Sedangkan laki-laki bekerja pada sektor publik di luar rumah. Dalam hal ini perempuan di daerah ini banyak yang kurang produktif dalam kegiatan ekonomi rumah tangga mereka banyak menghabiskan waktu luangnya dengan menonton televisi, tidur siang dll. Namun demikian, pada Program CSR Bank Sampah Mandiri, keterlibatan perempuan cukup tinggi. Hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimanakah sinergisitas peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga/keluarganya. Adanya kerjasama yang baik antar perempuan/istri dan laki-laki/suami dalam keluarga mempengaruhi keterlibatan perempuan/istri dan laki-laki/suami dalam masyarakat khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat CSR Bank Sampah Mandiri. Selain itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat setempat baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Asumsi peneliti lainnya adalah dipengaruhi juga oleh pola komunikasi yang dibangun antar perusahaan dan masyarakat penerima program CSR Bank Sampah Mandiri sehingga pesan pemberdayaan masyarakat yaitu merubah paradigma masyarakat dari membuang sampah yang tidak berguna menjadi mengelola sampah secara ekonomis yaitu dengan cara menabung sampah di Bank Sampah Mandiri dapat tersampaikan dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat penerima manfaat program CSR Bank Sampah

Mandiri. Selain itu juga banyaknya perempuan yang terlibat dalam program CSR Bank Sampah Mandiri ini menurut peneliti juga dipengaruhi oleh adanya pembagian peran yang baik antar suami dan istri dalam keluarga.

Pada tahun 2014 program CSR Bank Sampah Mandiri sudah *exit* program, akan tetapi pihak PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* masih melakukan pendampingan. Meskipun program CSR Bank Sampah Mandiri sudah *exit* program, namun program Bank Sampah Mandiri hingga saat ini masih *sustainable*. Selain itu program CSR Bank Sampah Mandiri sampai saat ini telah melakukan inovasi berkelanjutan sehingga Bank Sampah mandiri tidak hanya melakukan kegiatan utamanya saja yakni menabung sampah, melainkan memiliki kegiatan usaha ekonomi mikro yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga seperti usaha mikro berupa warung sampah, rumah laundry bahkan usaha kerajinan *Innel Creative Handicraft Daur Ulang* yang merupakan sentra kerajinan sampah yang memiliki nilai ekonomis.



2. Kerangka Pemikiran



Gambar. 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

C. Dimensi Penelitian

Dimensi penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penjelasan tentang informasi yang akan dikumpulkan untuk setiap variabel penelitian. Menurut Mardikanto (2010) dimensi adalah operasionalisasi pengertian variabel, yang digunakan untuk memberikan arahan bagi pengukurannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka beberapa dimensi yang informasinya akan dikumpulkan untuk setiap variabel penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah tentang CSR adalah serangkaian aturan yang berisi tindakan / kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan CSR dalam penelitian ini adalah Dasar hukum CSR (UU CSR, Peraturan Pemerintah tentang CSR).
2. Kebijakan program CSR adalah serangkaian aturan yang berisi tindakan / kegiatan yang diusulkan perusahaan terkait dengan pelaksanaan CSR yang terdiri dari: misi dan visi PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant*, tujuan pelaksanaan program CSR, prinsip dan pendekatan program CSR.
3. Inisiasi dari masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga adalah proses memulai ide/pemikiran terkait pengelolaan sampah rumah tangga dalam hal ini terkait kapan, siapa dan bagaimana bentuk ide/pemikiran tersebut.
4. Program CSR menurut Kotler dan Lee (2005) merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan dari praktek bisnis dan kontribusi dari sumber daya perusahaan. Dalam penelitian ini adalah program pemberdayaan masyarakat melalui program CSR Bank Sampah Mandiri yang dapat diketahui proses dan kegiatannya dengan melihat:
 - (1) Pendekatan pemberdayaan masyarakat mengacu pada Parson et. al (1994) dalam Mardikanto (2013:185) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilaksanakan secara kolektif melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan mikro, pendekatan mezzo dan pendekatan makro.

- (2) Strategi pemberdayaan masyarakat mengacu pada Korten, Sumodiningrat dalam Mardikanto (2013:194-195) strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan pemberdayaan masyarakat terdapat lima strategi pemberdayaan masyarakat yaitu: (1) Strategi *relief and welfare*, (2) Strategi *community development*, (3) Strategi *sustainable system development*, (4) Strategi gerakan masyarakat (*people movement*), (5) Strategi pemberdayaan masyarakat (*empowering people*).
- (3) Metode pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013: 227-235) dalam praktek pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa metode pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut: (1) Metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, (2) Metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, (3) Metode *Focus Group Discussion (FGD)*, (4) Metode *Participatory Learning and Action (PLA)*, (5) Metode Sekolah Lapang (*Farmers Field School*) dan (6) Pelatihan Partisipatif.
5. Lingkup pemberdayaan menurut Mardikanto (2013) adalah sebuah proses pengembangan masyarakat yang memiliki lingkup pemberdayaan yang dilakukan PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* melalui program CSR Bank Sampah Mandiri yang terdiri dari (1). Bina manusia, (2).Bina usaha, (3). Bina lingkungan dan (4). Bina kelembagaan.
6. Penerima manfaat menurut Mardikanto (2013) adalah pihak yang memiliki kedudukan setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan program CSR yang mendapatkan manfaat dari program CSR yang terdiri dari (1).Keluarga, (2). Masyarakat dan (3). Pemerintah.
7. Sistem pemberdayaan adalah sistem yang berlaku pada program pemberdayaan masyarakat dan telah diterapkan kepada masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat berdasarkan sistem penyuluhan dalam UU No. 16 Tahun 2006 yang terdiri dari (1). Kebijakan kegiatan, (2).Kelembagaan, (3). Ketenagaan, (4). Penyelenggaraan, (5). Pembiayaan, (6). Pengawasan, dan (7). Pengendalian.

8. Karakteristik masyarakat adalah sifat khas yang dimiliki masyarakat yang terdiri dari karakteristik masyarakat dilihat dari secara ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Pola komunikasi antar perusahaan dan masyarakat adalah bentuk komunikasi yang dibangun dalam menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana dinamika hubungan / dialektika hubungan (*Relational Dialektis*) yang menurut Leslie Baxter terdapat :
 - a) Dialektik yang terdiri atas:
 - 1) Dialektik internal : Koneksi-Otonomi, Kepastian-Ketidakpastian, Keterbukaan-Ketertutupan.
 - 2) Dialektik eksternal: Inklusi-Seklusi, Konvensional-Keunikan dan Pengungkapan-Penyembunyian
 - b) Dialogis yang terdiri atas:
 - 1) dialog sebagai proses yang membangun,
 - 2) dialog sebagai aliran dialektik,
 - 3) dialog sebagai momen estetik,
 - 4) dialog sebagai ungkapan, dan
 - 5) dialog sebagai sensibilitas kritis.
10. Profil peran gender masyarakat adalah gambaran peran gender pada masyarakat penerima manfaat program CSR. Dalam penelitian ini dapat dilihat dengan analisis gender kerangka Moser yang terdiri dari:
 - a) Peran gender: peran reproduksi, produksi dan sosial
 - b) Kebutuhan gender: kebutuhan strategis dan praktis
 - c) Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan program CSR
11. Hasil pemberdayaan masyarakat melalui sinergisitas peran gender adalah keberdayaan masyarakat dimana terdapat peningkatan aspek akses, peran, kontrol dan manfaat pada masyarakat baik laki-laki dan perempuan sebagai dampak dari program CSR Bank Sampah Mandiri.